

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RELOKASI
PASAR TERAPUNG SELODANG KELAPA DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memproleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

NAOMI FRISCILLA

NPM : 177310674

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naomi Friscilla
NPM : 177310754
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam relokasi Pasar Terapung Selodang Kelapa Di kabupaten Indragiri Hilir.

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Seminar Proposal ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

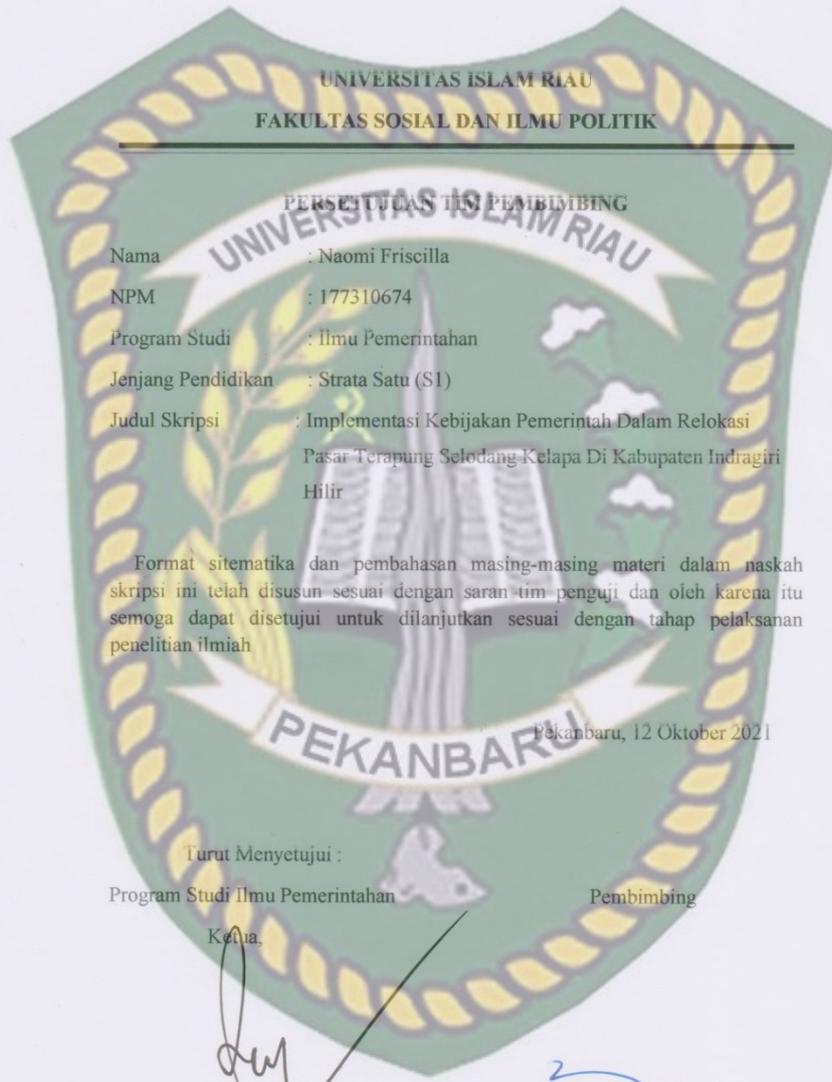
1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 November 2021

Yang Menyatakan,

Naomi Friscilla



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Naomi Friscilla
NPM : 177310674
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi
Pasar Terapung Selodang Kelapa Di Kabupaten Indragiri
Hilir

Format sitematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah skripsi ini telah disusun sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu semoga dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah

Pekanbaru, 12 Oktober 2021

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Budi Mulianto S. IPM.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Naomi Friscilla
NPM : 177310674
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi
Pasar Terapung Selodang Kelapa Di Kabupaten Indragiri
Hilir

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai Relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan Metode Penelitian Ilmiah, Oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana.

Pekanbaru, 12 Oktober 2021

Ketua,

Sekretaris,


Budi Muliarto S. IP, M. Si


Rizky Setiawan S. IP, M. Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Anggota,


Indra Syafri, S.Sos, M.Si


Dra. Hj. Monalisa M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Naomi Friscilla
NPM : 177310674
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Terapung Selodang Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 12 Oktober 2021
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,


Budi Muliando, S. IP, M. Si


Rizky Setiawan S. IP., M. Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Indra Syafri, S.Sos, M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M. Si

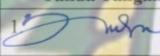
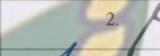
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 107/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 08 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 09 Desember 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Naomi Friscilla
NPM : 177310674
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Relokasi Pasar Terapung Selodang Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Budi Muliarto, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rendi Tri Afrinanda, S.Sos., M.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 09 Desember 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena dengan Rahmat dan Anugrahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat guna dalam memproleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan ilmu pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul usulan penelitian ini adalah **”Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Terapung Selodang Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir”** dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian dan ketentuan yang di tetapkan oleh fakultas.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa banyak kesalahan dan kekurangannya, penulis berharap kemakluman dan masukan dari para pembaca, serta dalam penulisan banyak mendapat bantuan dan arahan dari berbagai pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, namun sebagai ucapan terimakasih penulis maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof.Dr. H Syafrinaldi, SH.,MCL
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif,M .Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S .IP .,M.Si Selaku ketua Jurusan Program Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang selalu

memberikan motivasi dan semangat kepada si penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

4. Bapak Budi Mulianto S.IP,M Si selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan proposal saya dengan arahan dan waktu yang telah beliau berikan kepada penulis.
5. Kepada seluruh dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya untuk Dosen-Dosen prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan semua ilmu kepada penulis.
6. Dan juga berterimakasih kepada kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Rasman Tambunan dan Ibu Lismawati yang telah banyak berjasa, bersusah payah menjaga, membesarkan, membimbing, menasehati, mengajar, dan menjadi teman dalam bertukar pikiran dan penulis juga berterimakasih untuk segala pengorbanan selama ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

7. Dan juga berterimakasih kepada saudara kandung penulis yaitu Kakak-kakak penulis Ribka Marthilda Adm, Sarah Caroline, S.kep Dan adik saya Andrew Filemon Bati tuta.
8. Dan juga kepada teman teman penulis yaitu Itarama, Indah salsabilasyah, Annisa Fajriati, Ajeng Putri Ardiani, Wilda Astari, Refin prabandari ismoyo, Norma hotmaida, Fitryani, Meysi arniza, Dimo prasetya, Gibson vivere v, Joel Andreas Purba, Henok Turnip, Ivander sagala, Ilham Wansanjaya, dan Afrinaldi.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut di atas dibalas dengan rahmat dan karuniayang setimpal oleh Tuhan yang Maha Esa.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah berperan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan bagi orang banyak yang membaca sehingga dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Pekanbaru 30 Juni 2020

Naomi Friscilla

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Studi Kepustakaan	11
1. Pemerintahan	11
a. Pengertian Pemerintahan.....	11
b. Fungsi Pemerintahan.....	13
c. Urusan Pemerintahan.....	14
d. Pemerintah Sebagai Ilmu.....	15
2. Kebijakan.....	16
a. Pengertian Kebijakan.....	16
b. Tujuan Kebijakan.....	17
c. Ruang Lingkup Kebijakan	17
d. Kebijakan Pemerintah.....	17
3. Implementasi	18
a. Pengertian Implementasi	18
b. Tahapan Implementasi Kebijakan	19
c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan	20
4. Pasar	22
a. Pengertian Pasar	22
b. Bentuk dan Jenis Pasar	24
c. Pengelolaan Pasar Terhadap Pemerintah	26
5. Pasar Terapung	26
a. Pengertian Pasar Terapung.....	26
b. Bentuk dan Jenis Pasar Terapung	28
c. Pengeloaan Pasar Terapung	29
6. Relokasi	29
a. Pengertian Relokasi	29
b. Tujuan Relokasi	30
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Relokasi.....	30

B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pikir	33
D. Konsep Operasional	34
E. Operasional Variabel	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Informan atau Narasumber Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisa Data	43
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	46
1. Keadaan Geografis	46
2. Letak Kabupaten Indragiri Hilir	47
3. Batas	47
B. Pemerintahan	47
C. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir	49
D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir	52
E. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir	55
BAB V HASIL PENELITIAN	58
A. Identitas Informan	58
1. Jenis Kelamin Narasumber	58
2. Tingkat Umur Informan	60
3. Tingkat Pendidikan Informan	60
B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Terapung Selodang Kelapa	61
1. Karakteristik Masalah Dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Terapung	61
2. Karakteristik Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Terapung	65
3. Lingkungan Pasar Yang Menjadi Tempat Relokasi	66
C. Hambatan-hambatan Dalam melakukan implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar terapung selodang kelapa	68
1. Faktor Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Terapung	68
2. Faktor Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Terapung	71
3. Faktor Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Terapung	74
4. Faktor Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Paras Terapung	75

BAB VI PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Tim Koordinasi Relokasi Penempatan Pedagang Ikan dan Daging Di Pasar Terapung Selodang Kelapa Kabupaten Indragiri Hilir	8
Tabel I.II	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	31
Tabel II.II	Konsep Oprasional Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Di Kabupaten Indragiri Hilir.....	36
Tabel III.I	Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Di Kabupaten Indragiri Hilir....	45
Tabel III.II	Data Nama-nama Kecamatan Beserta Luas, Jumlah Kelurahan dan Jumlahn Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir	48
Tabel VI.I	Identitas Informan Berdasarkan jenis Kelamin	58
Tabel VI.II	Identitas Informan Berdasarkan Umur	59
Tabel V.I	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	60
Tabel V.II	Identitas Informan Berdasarkan Profesi	60

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.I	Gambar Struktur Kerangka Pikir Penelitian	34
Gambar I.II	Gambar Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir	53
Gambar II.II	Gambar Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir	56
Gambar III.I	Gambar Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir	59
Gambar III.II	Gambar pelaksanaan Penelitian dalam wawancara Informan	
Gambar VI.I	Gambar Kondisi Pasar Terapung	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan tempat dimana para penjual dan para pembeli melakukan transaksi untuk menawarkan barang dan jasa mereka, di Indonesia pasar terbagi menjadi beberapa jenis dan bentuk seperti pasar modern, pasar lokal dan juga pasar tradisional, Pasar tradisional merupakan pasar dimana proses transaksi yang dilakukan di sertai dengan sistem tawar menawar di dalamnya dan salah satunya yaitu pasar terapung.

Pasar Terapung (*Floating Market*) merupakan tempat dimana terjadinya kegiatan jual beli yang dilakukan di atas air dan sudah ada sejak empat ratus tahun yang lalu pada abad ke 18 dan merupakan peninggalan budaya banjar yang masih ada di indonesia sampai saat ini masyarakat banjarmasin memanfaatkan wilayah mereka yang sebagian besar merupakan pantaran sungai yang terdiri dari 25 pulau kecil dengan luas 98,46 km. Pasar terapung merupakan kumpulan vendor atau pedagang yang menjual barang dagangannya seperti pasar pada umumnya hanya saja transaksi di pasar terapung di lakukan di atas sampan atau perahu sehingga sedikit berbeda dengan pasar biasanya dan pada masa itu pasar terapung dikenal dengan sistem barter atau sistem tukar barang dimana uang tidak di gunakan dalam transaksi ini.

Seiring dengan perkembangan zaman kini pasar terapung bukan hanya kumpulan pedagang yang menggunakan media perahu atau sampan saat melakukan transaksi, kini pasar terapung sudah ada yang berbentuk bangunan pasar tetapi

tetap di bangun di atas air agar tidak menghilangkan identitas dari pasar terapung (sucipto, 2013)

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pasar terapung di daerah-daerah tertentu seperti di kalimantan selatan, sumatra utara, jawa barat, jawa timur dan juga ada di Riau tepatnya di kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten indragiri hilir yang di kenal dengan sebutan kota seribu parit atau kota seribu jembatan yang merupakan salah satu daerah dengan perkebunan kelapa terbesar di indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia dengan hasil produksi sebanyak 18,3 juta ton kelapa pertahun. Di indonesia salah satu provinsi penghasil kelapa terbanyak yaitu provinsi riau dengan jumlah produksi sebanyak 387,9 ribu ton pertahunnya. Di provinsi riau sendiri, tepatnya di kabupaten indragiri hilir yang merupakan kabupaten yang terkenal dengan hasil kelapanya yang berlimpah karena banyaknya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir membudidayakan kelapa yang tercatat sebesar 65,57 persen dari total luas perkebunan di kabupaten indragiri hilir dan tercatat untuk hasil kelapa hybrida mencapai 67.055,69 ton pertahunnya dari luas lahan 28.770 Ha. (Wiryadi, 2021)

Masyarakat dikabupaten indragiri hilir sebagian besar berprofesi sebagai petani di kebun mereka sendiri sekaligus menjadi pedagang menjual hasil kebun mereka. Para Pedagang di kabupaten indragirir hilir menjual berbagai barang dagangan mereka mulai dari menjual hasil kebun hingga segala jenis kebutuhan masyarakat mulai dari bahan pangan, sandang dan papan seperti sembako, ikan, sayur dan dan keperluan rumah tangga lainnya di pasar.

Pasar terapung merupakan salah satu pasar yang di kelola oleh pemerintah, pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi, mengatur, dan mengelola pasar tersebut, seperti mendata barang-barang yang di perbolehkan dan barang-barang yang dilarang di pasarkan di pasar tersebut, serta bertanggung jawab untuk memperhatikan peningkatan dan penurunan pendapatan di pasar tersebut sehingga setiap pasar memiliki aturannya masing-masing dalam proses jual beli yang dilakukan, selain itu Pemerintah bertanggung jawab dalam mengatur dan menjaga infrastruktur bangunan pasar agar tetap layak untuk digunakan, sehingga segala perbaikan, pembangunan hingga pemindahan pasar di atur dan dilaksanakan melalui pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam suatu daerah tersebut. (kasim, 2006).

Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, bisa berbentuk perintah, keputusan atau putusan, proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan dan seterusnya dilakukan. (Dewi, 2015)

Kebijakan di suatu daerah merupakan urusan daerah yang telah di atur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di Indonesia banyak sekali bentuk-bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan negara seperti kebijakan dalam pelayanan, penertiban, pengawasan hingga pembangun dan lain lain. (Jatmika, 2017).

Relokasi atau pemindahan merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam penertipan sarana dan prasarana negara, relokasi ini bertujuan untuk mencari atau menemukan suasana baru dan dalam pelaksanaan relokasi pasti memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa relokasi tersebut dilaksanakan seperti lokasi lama yang tidak strategis lagi, tidak adanya peningkatan ekonomi yang terjadi di lokasi lama dan juga tempat lama yang sudah tidak layak pakai dan lainnya banyak hal yang memicu pelaksanaan relokasi suatu tempat tersebut dan di dukung oleh peraturan yang mengaturnya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah kabupaten yang di atur dalam peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar teradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Kebijakan pemerintah kabupaten indragiri hilir dalam hal pelaksanaan relokasi pasar terapung di kabupaten indragiri di atur dalam Peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan pasar dan Kpts 135/II/HK-2019 tentang pembentukan Tim koordinasi relokasi pasar terapung untuk pedagang ikan dan daging JL. yos sudarso Tembilihan di kabupaten indragiri hilir.

Kabupaten indragiri hilir memiliki beberapa pasar yaitu, Pasar terapung selodang kelapa, pasar kayu jati, pasar rumbai, pasar santan kelapa, diantara ke empat pasar ini pasar terapung adalah pasar yang terbesar dan paling di minati oleh banyak orang, karena letaknya yang strategis yang berada di tengah kota, tetapi pada 27 april 2016 sebagian lantai pasar terapung daging dan ikan ambruk

yang membuat lobang yang cukup besar dan bisa dikatakan berbahaya untuk para pedagang dan pengunjung pasar tersebut. (Agustina, 2017)

Pada (28/1/2019) sekitar 06.20 WIB lantai pasar terapung selodang kelapa kembali ambruk sehingga memperparah kondisi pasar dan juga jumlah kios dan ios tempel yang membuat pasar semakin sesak, ditambah lagi dengan sisi langit pasar yang retak sehingga dapat dikatakan bahwa pasar terapung selodang kelapa ini bangunan tidak layak pakai, pada 1 agustus 2019 melalui (Disperindag) akan membangun tempat penampungan sementara (TPS) bagi para pedagang pasar terapung yang mengalami ambruk los atau meja dagangan mereka pada tahun 2016 silam.

Pembangunan ini akan di laksanakan dan akan di rapatkan terlebih dahulu oleh para pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir dan rencana pembangunan yang akan dilakukan merupakan proyek konstruksi yang dimana proyek ini berupa pekerjaan membangun produk fisik seperti jalan, jembatan, dan bangunan pemerintah lainnya dan juga pemerintah harus memperhatikan kondisi tempat di mana pembangunan akan di lakukan dan di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2017 tentang rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. (Santoso B. , 2009)

Pada pembangunan ini Pemerintah juga tidak akan membangun pasar di dekat sungai atau di atas sungai lagi karena di anggap bangunan yang di bangun di atas sungai atau air tidak akan bertahan lama, dan lagi menyalahi peraturan menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015, Peraturan menteri PU No,63/PRT/1993 dan PP No 38 tahun 2011 tentang garis sempadan sungai dan garis sempadan danau maka

dari itu pemerintah kabupaten indragiri hilir memutuskan untuk membangun dan akan merelokasikan pasar terapung tersebut ke lokasi lain dan tidak di daerah yang terkena batas sepadan sungai dan danau lagi . (Anggraini, 2018)

Ambruk nya lantai pasar terapung sudah terjadi 2 kali, kurang lebih 20 meja kios, upaya yang di lakukan pemerintah untuk ambruknya meja para pedagang pada tahun 2016 silam di buatkan tempat penampungan sementara(TPS) yang diperuntukan untuk para pedagang yang meja dagangan yang ambruk 2016 silam dan selesai akhir 2019 kemarin, sampai sekarang di ketahui tempat penampungan sementara tersebut belum juga beroperasi.

Belum beroperasinya tempat penampungan sementara tersebut dikarenakan jumlah tempat penampungan sementara yang di buat tidak mencukupi jumlah pedagang yang mau di relokasi pasca ambruknya lantai pasar tersebut tercatat sebanyak 235 pedagang , sedangkan yang baru selesai di bangun yaitu blok C 64 meja dan blok D yang juga berjumlah 64 meja, sehingga total yang sudah siap hanya 128 meja dari dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir, untuk diketahui rencana pembangunan tempat penampungan sementara di pasar terapung sebanyak 4 blok, tidak termasuk dengan pasar terapung sembako yang pada Agustus 2019 silam terbakar. Sehingga pemerintah menunggu bantuan dan dari CSR bank Riau kepri untuk pembuatan blok B dan dari dana PT Pulau sambu untuk pembuatan blok A.

Kemudian kendala berikutnya yang harus di hadapi pemerintah dalam merelokasi pasar terapung ini yaitu tidak maunya para pedagang di relokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah dengan beberapa alasan salah

satunya karena pedagang menganggap bahwa lokasi pasar yang lama merupakan lokasi yang strategis.

Hingga saat ini para pedagang masih berjualan di pasar tersebut dengan memanfaatkan lahan yang seharusnya di gunakan untuk lahan parkir dengan membuat meja-meja dagangan mereka agar tetap bisa berjualan, padahal di kabupaten indragiri hilir masih ada pasar-pasar yang kosong yang tidak dipakai, seperti pasar kayu jati dan pasar pagi, dan dari pihak pemerintah juga sudah ada usukan kepada para pedagang untuk menempati meja-meja yang kosong di kedua pasar tersebut, tetapi tidak di indahkan oleh para pedagang dengan alasan lokasi jauh dari sungai, Pada (31/1/2019) wakil bupati Indragiri Hilir (INHIL) Syamsuddin Uti telah mendatangi pasar terapung untuk melihat Kondisi pasar terapung pasca beberapa kios yang kembali ambruk.

Ambruknya lantai pasar terapung selodang kelapa di Kabupaten indragiri Hilir dan mengakibatkan aktivitas jual beli pedagang terganggu dan takut jikalau terjadi terjadi roboh susulan kerana kerusakan bangunan sudah mencapai 55,50%.

Maka dari itu untuk menghindari terjadinya runtuhnya bangunan susulan yang nantinya dikhawatirkan bisa menimbulkan korban jiwa dan sangat berbahaya baik untuk pedagang dan para pembeli, maka dari itu di perlukan pemindahan atau relokasi secepatnya, maka dari itu Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan mambentuk tim koordinasi Relokasi pasar Terapung antara lain.

Tabel I.I Tim Koordinasi Relokasi Penempatan Pedagang Ikan dan Daging di Pasar Terapung Selodang Kelapa kab.Inhil.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Indragiri Hilir	PEMBINA
2	Wakil Bupati Indragiri Hilir	PENGARAH
3	Sekretaris Daerah Kab.Inhil	PENANGUNG JAWAB
4	Asisten Administrasi Ekonomi Dan Pembangunan Setda Kab.Inhil	KETUA
5	Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesra Setda Kab.Inhil	WAKIL KETUA
6	Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kab.Inhil	SEKRETARIS
7	Kadis Perhubungan Kab. Inhil	ANGGOTA
8	Kadis Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kab.Inhil	ANGGOTA
9	Kadis Perumahan Rakyat Dan Pemukiman Kab. Inhil	ANGGOTA
10	KABAN Pendapatan Daerah Kab.Inhil	ANGGOTA
11	Kepala BPKAD Kab.inhil	ANGGOTA
12	Kepala BAPPEDA Kab.Inhil	ANGGOTA
13	Inspektur Inspektorat Kab.Inhil	ANGGOTA
14	Kasat Pol.PP Kab.Inhil	ANGGOTA
15	KABAG Hukum SETDA Kab.Inhil	ANGGOTA
16	KABAG Administrasi Perekonomian SETDA Kab.Inhil	ANGGOTA
17	KABAG Trantibum Dan LINMAS SETDA Kab.Inhil	ANGGOTA
18	Camat Tembilahan	ANGGOTA
19	KABID Pasar DISPERINDAG Kab.Inhil	ANGGOTA
20	Lurah Tembilahan Kota	ANGGOTA

Sumber: Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir

Pembentukan tim koordinasi relokasi pasar terapung untuk pedagang ikan dan daging ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan umum, kesehatan dan kebersihan lingkungan untuk kebaikan dan kenyamanan masyarakat sekitar pasar tersebut dan juga untuk para pedagang dan para pengunjung yang berbelanja di pasar terapung tersebut.

Tim koordinasi yang telah ditetapkan ini yang nantinya akan merelokasi pasar terapung tersebut sesuai dengan keputusan bupati Nomor kpts 135/II/H-K 2019 dengan menimbang bahwa pasca runtuhnya sebagian bangunan pasar terapung selodang kelapa pada bagian lantai pasar pada tanggal 27 april 2016 yang ditakutkan akan terjadi runtuh susulan melihat kondisi bangunan yang sudah tidak layak pakai.

Pada kamis 22 agustus 2019 terjadi kebakaran di pasar terapung sembako yang menghancurkan bangunan pasar terapung sembako sehingga para pedagang harus berjualan di lahan yang seharusnya di gunakan untuk lahan parkir.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar terapung selodang kelapa di kabupaten indragiri hilir.
2. Apa saja Faktor-Faktor Penghambatan dalam implementasi kebijakan relokasi terapung pasar selodang kelapa.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar terapung selodang kelapa di kabupaten indragiri hilir.

2. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor Penghambat dalam implementasi kebijakan relokasi pasar terapung selodang kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan yang akan di pertimbangkan dan di telaah oleh para pihak yang bersangkutan dalam pengimplementasian kebijakan relokasi pasar dan bagi para pedagang yang akan di relokasi tempat berjualannya ke tempat yang lebih baik lagi.
2. Dan hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu pemerintahan yang mengatur dan melaksanakan tugas pemerintah demi kesejahteraan bersama dan juga menjadi acuan bagi para peneliti yang selanjutnya dalam hal relokasi pasar terapung selodang kelapa di kabupaten indragiri hilir Tembilahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperlancar dan mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Relokasi Pasar Terapung Selodang Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir” maka untuk mengetahui tujuan dan arah penelitian ini di butuhkan teori yang saling berkaitan agar penelitian ini terarah dan mendapatkan jawaban yang falid dari penelitian ini.

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Kusnardi (2016:4) Pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja melaikan juga meluputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Kencana (2011:8) Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Pemerintahan merupakan kumpulan orang-orang atau sekelompok orang-orang yang memiliki atau di beri kuasa atau wewenang secara penuh untuk memerintah dan untuk menerapkan segala peraturan atau hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tersebut maka dari itu pemerintah juga dapat dikatakan sebagai badan atau lembaga yang memilki tugas untuk mencapai tujuan negara

yang sudah di rancangan dan terstruktur dengan kewenangan dalam pelaksanaan proses kepemimpinan tersebut.

Pemerintah dari makna yang lebih luas merupakan suatu roda yang meliputi badan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang biasa kita kenal dengan trias politika yang memiliki tugas dan kewenangannya masing masing dalam menjalankan roda pemerintahan dan saling bekerjasama dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang memiliki tugas yaitu membuat, menjalankan dan mengawasi dengan berlandaskan pada Undang-undang Dasar dan pancasila.

Pemerintahan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang dimana pemerintahan memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam ilmu pengetahuan yang bisa di ajarkan, sistematis dan juga spesifik dan di dalamnya terdapat ide, gagasan yang digunakan untuk membangun dan untuk mencapai segala tujuan yang ingin di capai dalam menjalankan pemerintahan ini.

Dalam arti sempit pemerintahan hanya meliputi eksekutif saja sementara itu pemerintahan dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menjalankan roda pemerintahan dengan kewenangan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengarahkan seluruh urusan negara dengan berdasarkan UU dan peraturan-peraturan yang sudah di sahkan untuk di patuhi dan di terapkan kepada seluruh masyarakat yang merupakan warga negara Republik Indonesia. (Dr.Drs, 2017)

b. Fungsi Pemerintahan

Fungsi dari pemerintahan itu sendiri ada tiga, yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di mana ketiga fungsi ini merupakan hal-hal yang sangat penting untuk suatu negara untuk menjadi negara berkembang dan negara maju, ketiga fungsi ini di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu primer dan skunder yang merupakan dua hal yang berbeda dimana primer merupakan hal yang hubungan yang baik dengan pihak yang di perintah dan fungsi terus menerus berjalan dan tidak berkurang dan meningkatkan kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan politik fungsi primer merupakan penyediaan kebutuhan masyarakat yang biasa kita sebut dengan pelayanan masyarakat berupa barang maupun jasa.

Sementara itu fungsi skunder berbanding terbalik dengan fungsi primer dimana fungsi skunder berhubungan negatif dengan ekonomi, sosial masyarakat dan politik dimana jika ketiga hal ini semakin membaik maka semakin berkurang pula fungsi dari skunder tersebut. Di dalam pemerintahan setiap anggota pemerintahan memiliki tugas dan bidangnya masing masing sehingga tugas dan pekerjaannya berbeda-beda, baik dari bidang, tempat, wilayah dan rana yang setiap anggota memiliki tanggung jawabnya masing masing pula, maka dari itu pemerintah membagi segala pekerjaan dan urusan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa bagian

Pemerintah juga merupakan banyak cara yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan dan kesejahteraan suatu negara dan kesejahteraan bagi rakyatnya juga dan merupakan ilmu karena kebanyakan pemerintah merupakan

dari orang-orang yang berpendidikan dan memiliki skill sehingga dapat memenuhi syarat sebagai pemimpin dalam memimpin berjalanya roda pemerintahan tersebut.

Fungsi pemerintahan menurut adam smith (1976)

1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri
2. Menyelenggarakan peradilan
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta

Secara keseluruhan dapat di artikan bahwa pemerintah memiliki fungsi yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan yang di mana kita tahu bahwa itulah tugas pemerintah yang harus berjalan dengan baik dengan mengutamakan ke empat fungsi tersebut yang tentunya merupakan hal yang sangat di butuhkan masyarakat dalam suatu negara tersebut

c. Urusan Pemerintah

Urusan pemerintahan Absolut adalah segala urusan dalam pemerintahan merupakan tanggung jawab atau kewenangan pemerintah pusat sehingga segala urusan dilaksanakan sesuai dengan kehendak dan peraturan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang di bagi menjadi urusan pemerintahan pusat, urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah yang di atur dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan pembagian ini dilakukan agar setiap pemerintah dapat menjangkau seluruh masyarakat dan juga masyarakat lebih di perhatikan oleh pemerintah jika ada

pembagian tugas, yang terakhir ada urusan pemerintah umum dimana ini menjadi kewenangan bagi presiden sebagai kepala pemerintahan.`(Firmansyah, 2015)

Urusan pemerintah ada dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan wajib meliputi hal hal seperti pembangunan, penyediaan prasarana dan kebutuhan fasilitas lainnya sementara itu urusan pemerintah pilihan merupakan urusn yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kekhasan dan keunggulan yang dimiliki wilayah atau daerah tersebut sehingga setiap daerah atau wilayah berbeda-beda pula urusan pilihannya dan salah satu urusan pilihan yang di lakukan pemerintah yaitu melakukan relokasi yang memindahkan suatu tempat ketempat yang lain dengan di pengaruhi beberapa faktor penyebab.

d. Pemerintahan Sebagai Ilmu

Pemerintahan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang dimana pemerintahan memenuhi syarat yang terdapat dalam ilmu pengetahuan yang bisa di ajarkan, sistematis dan juga spesifik dan di dalamnya terdapat ide, gagasan yang digunakan untuk membangun dan untuk mencapai segala tujuan yang ingin di capai dalam menjalankan pemerintahan ini, dan dalam arti sempit pemerintahan hanya meliputi eksekutif saja sementara itu pemerintahan dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menjalankan roda pemerintahan dengan kewenangan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengarahkan seluruh urusan negara dengan berdasarkan UU dan peraturan-peraturan yang sudah di sahkan untuk di patuhi dan di terapkan kepada seluruh masyarakat yang merupakan warga negara Republik Indonesia. (Mulyawan, 2015)

2. Kebijakan

a. Pengertian kebijakan

Menurut Mustopadidjaja (2010 : 3) Kebijakan merupakan suatu keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk dapat mengatasi permasalahan tertentu ialah sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan pedoman perilaku dalam pengambilan sebuah keputusan, penerapan dan pelaksanaan suatu kebijakan tersebut. (Asyiah, 2018)

Kebijakan merupakan langkah yang harus di ambil pemerintah dalam menyelesaikan suatu keadaan dan di mana kebijakan merupakan rencana atau planing dalam suatu pekerjaan, kebijakan yang di tetapkan dapat berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan yang di tetapkan. (Kusumanegara, 2010)

Kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah merupakan hal yang harus ditaati sehingga disetiap kebijakan di ikuti oleh peraturan yang mengaturnya. Dalam membentuk suatu kebijakan, pemerintah memperhatikan apa saja yang di butuhkan masyarakat daerah tersebut. (Sudiro, 2018).

Kebijakan merupakan hal yang di lakukan untuk kepentingan banyak orang yang biasa disebut dengan kebijakan publik yang berkaitan dengan segala kepentingan umum atau kepentingan untuk masyarakat banyak, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga kebijakan publik tidak terlepas dari bidang ekonomi, politik agama dan yang lainnya. (Burhan Bungi, 2005)

b. Tujuan Kebijakan

Dalam membentuk kebijakan pemerintah pasti memiliki alasan kenapa kebijakan itu ada dan di terapkan dalam suatu negara tersebut, tujuan kebijakan yang di buat dan dilaksanakan pemerintah adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, selain itu tujuan diciptakanya kebijakan publik ini untuk menjaga ketertiban masyarakat, tujuan - tujuan dari kebijakan publik ini antara lain melindungi hak-hak masyarakat, menjaga ketentraman, menjaga perdamaian dan juga bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik. (M.A, 2012)

c. Ruang Lingkup kebijakan

Ruang lingkup kebijakan pemerintah merupakan hal yang sangat luas mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan lain lain sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat dilaksanakan dan jalakan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, karena segala keperluan dan urusan masyarakat pastinya akan berhubungan dengan ekonomi, sosial, politik, budaya dan yang lainnya, dan juga kebijakan memiliki daerah batasan yang berlaku (Mohamad Shohibuddin, 2013) (leo agustino s.sos., 2008).

d. Kebijakan Pemerintah

Wilson (2006:154) Kebijakan pemerintah merupakan tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langka yang sedang di ambil untuk diimplementasikan.

Kebijakan pemerintah merupakan segala urusan pemerintah yang di tujukan untuk mengatur atau menata untuk kepentingan seluruh masyarakat dan merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan hal-hal yang di aturnya yaitu

lingkungan sekitarnya yang di jalankan oleh aktor-aktor pemerintah yang sudah di percayakan melalui pemilihan umum dan pengangkatan jabatan, kebijakan publik merupakan peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh pejabat formal. (Suharno, 2020)

3. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tindakan di mana di perlukan pelaksanaan dengan menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah terstruktur secara rinci dan bukan hanya sebuah aktifitas tetapi implementasi merupakan kegiatan yang sudah matang dan di kerjakan secara serius dan tepat demi terwujudnya tujuan yang sudah di rancangan. (hutahayan, 2019).

Menurut daniel A. Mazmanian dan paul sabatier (1979) implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian.

Menurut Grindle (1980:7) implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat di teliti pada tingkat program tertentu, proses implementasi baru akan di mulai apabila tujuan dan sasaran telah di tetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan di salurkan untuk mencapai sasaran(Ajtai et al., 2008)

Implementasi kebijakan merupakan penerapan atau pelaksanaan aturan pemerintah dan biasa juga di katakan sebagai tindakan untuk memperbaiki atau menjadikan sesuatu itu lebih baik lagi dengan menerapkan kebijakn kebijakan yang telah dibuat.

Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi-aspirasi yang di sampai kan masyarakat walau tidak semua aspirasi masyarakat dapat di wujudkan, dari implementasi ini pemerintah dapat mengatur bagaimana seharusnya roda pemerintahan itu berjalan dan bagaimana penerapan-penerapan atau implentasi kebijakan kebijakan yang telah di buat dapat terlaksana dan dapat di patuhi oleh seluruh masyarakat di indonesia.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik.

b. Tahapan implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan publik adalah salah satu dari banyaknya aktifitas dalam menjalankan kan kebijakan dan sudah menjadi kuadrat bahwasanya setiap kebijakan-kebijakan yang telah di buat dan telah di sahkan harus di implementasikan, agar segala kebijakan-kebijakan ini dapat terlaksanakan dan tentunya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dalam membangun indonesia sejahtera dan dalam hal implementasi kebijakakan ini memiliki tahapan dalam menjalakannya antara lain.

1. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan yang nantinya menjdi dasar pelaksanaan kebijakan yang akan di gunakan atau diterapkan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksanaan, yang mengurus segala pelaksanaan implementasi kebijakan
3. Kesiadaan kelompok yang ingin dituju untuk menjalankan keputusan yang sudah di ambil atau sudah ditetapkan
4. Dampak yang terlihat dan nyata dari kebijakan atau keputusan yang di ingini maupun tidak diinginkan.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana

6. yang dilakukan jika diperlukan atas peraturan perundangan yang digunakan (Kurniawan, 2009) (wahab, 2014)

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan implementasi kebijakan yang akan dilakukan menurut Daniel Mazmanian dan sabatier antara lain:

1. Karakteristik Masalah, Dalam menjalankan implementasi kebijakan akan beragam masalah yang muncul yang akan menjadi kendala atau penghambat dalam proses keberlangsungan program ini yang sedikit banyaknya mempengaruhi implementasi kebijakan ini dan kita harus mengenali ragam masalah yang akan terjadi dan mencari cara agar masalah tersebut dapat di selesaikan sehingga proses implementasi kebijakan yang akan dilakukan tidak terhambat, sehingga tujuan dan target yang telah di rancangan dapat tercapai.

2. Karakteristik Kebijakan, Dalam sebuah mengimplementasikan kebijakan kita harus mengenal terlebih dahulu karakter kebijakan yang akan di gunakan untuk suatu program yang akan di jalankan, selanjutnya baru kita dapat menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dari pengimplementasian ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah di buat.

3. Lingkungan, dan faktor-faktor yang juga sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu faktor dari lingkungan sekitar yang merupakan faktor di luar peraturan seperti kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi, dan dukungan publik, dan hal –hal ini sangat mempengaruhi kelancaran dalam proses implementasi kebijakan tersebut, karena

lingkungan sekitar merupakan hal yang cukup berpengaruh dalam implementasi ini.

Implementasi menurut Edwards III (1980) Ada empat yaitu: (Dwiyanto indiahono, 2017)

1. Faktor komunikasi, di dalam implementasi kebijakan komunikasi yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas pemerintah dan untuk mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan tersebut, Penyampaian komunikasi yang benar merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini, sehingga mengurangi kesalahpahaman yang bisa saja terjadi akibat penyampaian yang kurang benar, dalam hal ini pemerintah merupakan orang yang memiliki informasi yang harus di sampaikan kepada masyarakat tentang kebijakan relokasi pasar yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten indragiri hilir, penyampaian informasi ini harus jelas agar masyarakat paham dan mengerti sehingga meminimalisir jumlah penolakan yang akan terjadi.

2. Faktor sumber daya, dalam implementasi kebijakan pemerintah juga harus memperhatikan sumberdaya yang digunakan baik dari sumberdaya manusia, materi dan metoda yang nantinya akan digunakan, walaupun semua hal sudah dikomunikasikan dengan baik tetapi harus tetap memperhatikan sumberdaya nya juga siapa saja yang ikut berperan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan relokasi pasar terapan tersebut agar implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan struktur yang telah dibuat.

3. Faktor disposisi, dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang baik sangat di perlukan impmentor yang memiliki watak yang baik pula, bukan hanya wataknya saja tetapi dari segi karakternya juga diharapkan baik karena jika si implementor memiliki kejujuran, komitmen, kecerdikan dan sifat demokratis yang baik maka peluang tercapainya tujuan implementasi kebijakan yang dibuat itu semakin besar.

4. Struktur Birokrasi, dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi merupakan salah satu hal yang berpengaruh di dalamnya karena setiap menjalankan kebijakan yang sudah dibuat, menetapkan siapa saja dan apa saja tugas yang sudah di berikan dalam pelaksanaan relokasi pasar terapung ini dan haruslah merupakan struktur birokrasi yang jelas dan tidak bertele-tele karena jika struktur birokrasi yang terlalu panjang akan membuat lemahnya pengawasan dalam proses berjalannya relokasi pasar dan juga dapat menimbulkan permasalahan yang tidak terkontrol dengan baik dan nantinya dapat menyebabkan organisasi tidak fleksibel. (Mening Subekti , Muslih Faozanudin, 2017)

4. Pasar

a. Pengertian Pasar

Menurut H. Nystrom pasar merupakan tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penyaluran barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen singkatnya merupakan tempat transaksi barang dan jasa antara produsen dan konsumen (Nursalam, 2016 & Fallis, 2013).

Pasar merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang menyediakan atau menjual berbagai bahan pangan dan benda-benda lain yang di butuhkan masyarakat sebagai keperluan untuk hidup, pasar juga merupakan salah satu dari berbagai institusi, sistem, hubungan sosial, sistem dan infrastruktur tempat masyarakat berdagang atasu tempat usaha yang di mana kita dapat menemukan para pedagang menawarkan daganganya mulai dari barang hingga jasa, dan mereka menggunakan uang untuk membeli barang tersebut, berbeda halnya dengan zaman dahulu masyarakat membayar barang dengan barang dan jasa dengan jasa yang sering kita sebut dengan sistem barter. (D.Indriati SCP, 2008)

Pasar merupakan area tempat jual beli barang yang dimana barang yang di jual bukan hanya satu barang tetapi ada banyak jenis barang yang di jual, mulai dari penjualan bahan pangan seperti ikan, ayam, daging dan lain lain dan juga pasar menjual barang berupa pakaian hingga barang-barang elektronik. Pusat perbelanjaan yang kita kenal bukan hanya pasar tradisonal saja, tetapi ada banyak pusat perbelanjaan mulai dari pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, dan sebutan lainnya yang menawarkan barang-barang yang sama hanya saja dari satu tempat dengan tempat yang lain hanya berbeda kualitasnya saja.

Pasar secara umum merupakan tempat transaksi di mana sekumpulan orang melakukan transaksi dengan berjualan dan membeli barang atau jasa yang tentunya mereka mendapatkan atau saling menguntungkan, bukan hanya pembeli dan pedagang saja yang di untungkan tetapi pasar juga merupakan salah satu faktor meningkatkan perekonomian suatu daerah, ada beberapa fungsi dari pasar yang ternyata bukan hanya tempat jual beli saja antara lainya yaitu dari

b. Bentuk dan Jenis Pasar

Pasar berdasarkan bentuknya terbagi menjadi beberapa bagian mulai dari sifat dan wujudnya, luas wilayah, menurut organisasi pasar, dan menurut barang yang di perjual belikan antara lain:

Pasar berdasarkan sifat dan wujudnya terbagi 2 yaitu pasar konkret dan pasar abstrak

1. Pasar konkret merupakan pasar yang benar-benar menjual apa yang ada atau nyata, yang dilihat langsung oleh pembeli sehingga barang yang di inginkan bisa langsung di beli oleh si pembeli dan dimana para pedagang dan para pembeli bertemu langsung untuk melakukan intraksi jual beli tersebut dan transaksi dilakukan secara tunai.
2. Pasar abstrak merupakan pasar yang berbanding terbalik dengan pasar konkret dimana barang di pasar ini tidak tersedia secara nyata sehingga barang yang ini di beli membutuhkan waktu untuk prosesnya, dan di minta dalam transaksi di pasar ini yaitu saling percaya antara si pembeli dan di penjual agar terjadi dan terlaksana proses jual beli tersebut.
3. Pasar ini biasanya menjual barang-barang yang membutuhkan proses untuk membuatnya sehingga pembelian di pasar ini harus memesan jauh sebelum pengambilan barangnya, misalnya seperti pembelian baju atau sepatu yang sesuai dengan model dan desain yang kita ingini, sehingga pedagang membutuhkan jangka waktu untuk membuat pesanan tersebut dan misalnya dengan memberi contoh bentuk dan model baju kepada si pembeli, seperti itulah pasar abstrak tersebut. (Reksoprajitno, 1993)

Dalam hal luas wilayah pasar di bagi menjadi 4 yaitu.

1. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara.
2. Pasar internasional, adalah pasar yang pemasarannya mencakup seluruh negara di dunia.
3. Pasar lokal, adalah pasar yang pemasarannya di daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat sekitarnya.
4. Pasar nasional, adalah pasar yang pemasarannya meliputi wilayah satu negara saja.

Bukan hanya bentuk tetapi pasar juga memiliki jenis-jenis pasar yang membedakan satu pasar dengan pasar yang lain Adapun beberapa jenis pasar yaitu pasar nyata, pasar abstrak, pasar tradisional dan pasar modern dan di indonesia kebanyakan orang mengenal pasar yaitu pasar Tradisional dan pasar modern seperti berikut:

1. Pasar Tradisional, merupakan tempat bertemunya para penjual dan calon pembeli dan ada interaksi dan transaksi yang dilakukan kedua belah pihak dimana di pasar tradisional ini memberlakukan sistem tawar-menawar untuk menepakati harga sesuai dengan keinginan penjual dan pembeli, sehingga jika sudah disepakati maka barulah terjadi aktifitas jual beli tersebut, bangunan pasar tradisional biasanya berupa kios, atau gerai dan pada umumnya pasar tradisional berada di tempat terbuka dan merupakan pasar yang dibuka oleh pengelola pasar dan biasanya pasar tradisional di kelolah oleh pemerintah daerah tersebut dan salah satu contoh pasar tradisional yaitu pasar terapung atau pasar apung.

(Tambunan, 2020)

2. Pasar modern, merupakan tempat perbelanjaan yang mengadopsi perkembangan zaman yang semakin canggih, bisa kita lihat dari bangunan yang bisanya berada di gedung-gedung besar dan didalam pasar modern ini tidak

menerapkan sistem tawar-menawar karena harganya sudah di tetapkan, dan biasanya pasar modern ini merupakan pasar yang bersih dan terstruktur sehingga kita tidak menemukan jalanan yang becek seperti di pasar tradisional.

c. Pengelolaan Pasar Oleh Pemerintah

Pengelolaan pasar yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dalam hal pembangunan dan ketertiban pasar tersebut, seperti pada pasar tradisional dalam suatu daerah yang di kelola oleh pemerintah daerah tersebut, peran pemerintah dalam pengelolaan pasar mulai dari lokasi pasar, keamanan dan ketertiban pasar yang harus selalu di jaga, karena pasar merupakan salah satu sumber pendapatan bagi setiap daerah sehingga pemerintah harus tetap mempertahankan dan harus selalu memperhatikan perkembangan ekonomi di daerah tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan apa saja yang harus dilakukan untuk tetap menunjang perekonomian daerah mereka.

5. Pasar Terapung

a. Pengertian Pasar Terapung

Menurut muhidah (2013) Pasar terapung merupakan tempat jual-beli yang bersifat khas, tradisional dilihat dari sarana pendukung, penjual dan pembeli, dan waktu, serta sistem transaksi dilokasi pasar itu sendiri.

Pasar merupakan tempat di mana masyarakat melakukan transaksi jual beli dan saling menguntungkan sedangkan yang di katakan dengan pasar terapung merupakan pasar yang melakukan transaksi jual beli di atas perahu atau sampan, Pasar terapung adalah sebutan yang biasanya di gunakan orang orang untuk menamai sarana jual beli yang dilakukan di atas sungai atau danau baik itu pasar

yang proses jual belinya terjadi di atas perahu atau sampan maupun proses jual beli yang dilakukan di bangunan yang berada di atas sungai maupun danau.(Geografi, 2016).

Kebanyakan masyarakat lebih mengenal bahwa pasar terapung merupakan pasar yang menggunakan perahu atau sampan, pasar terapung merupakan pasar tradisional yang sampai saat ini masih ada terutama di kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, masyarakat Banjarmasin masih melestarikan proses jual beli di atas sungai dan faktor yang mendukung mengapa proses jual beli masyarakat Banjarmasin terjadi di atas sungai itu dikarenakan 98,46 km yang wilayahnya terdiri dari 25 pulau kecil dan bisadi katakan bahwa masyarakat Banjarmasin memanfaatkan perairan atau wilayah yang sebagian besar adalah perairan agar tetap menjaga perekonomian wilayah tersebut.

Pasar terapung yang kita tau adalah pasar yang awal mulanya berasal dari Thailand di mana Thailand merupakan wilayah yang sebagian besarnya adalah perairan, masyarakat Thailand biasanya melakukan transaksi jual beli di atas air, dan jika kita lihat dari segi ekonomi pasar terapung merupakan salah satu peningkat perekonomian negara dengan terjadinya transaksi jual beli dan menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat dan turis turis mancanegara dan akan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern tetapi tidak menghilangkan keaslian pasar terapung tersebut.

b. Bentuk dan Jenis Pasar Terapung

Pasar terapung merupakan pasar yang bisa dikatakan unik karena proses berlangsungnya jual beli di atas sungai atau danau, pasar terapung juga memiliki beberapa bentuk dan jenis pasar antara lain jenis-jenis pasar terapung yaitu

1. Pasar terapung menggunakan sampan, pasar terapung yang menggunakan sampan merupakan pasar terapung yang iasa kita kenal baik di mancanegara maupun dunia, proses jual beli yang dilakukan di atas sungai atau danau dengan menggunakan sampan, ini bisa kita temukan di berbagai daerah dan salah satunya di kalimantan, proses jual beli menggunakan sampan yang mana si pembeli akan menunggu di pinggir sungai atau para pembeli juga menggunakan sampan untuk menjangkau pedagang-pedagang pasar terapung tersebut, dan biasanya pasar ini beroperasi di pagi hari sekitar pukul 05.00 hingga menjelang siang.

2. Pasar terapung bangunan, seperti pembahasan di atas kita mengenal pasar terapung pada umumnya ialah pasar yang menggunakan sampan atau perahu untuk melakukan transaksi di pasar terapung tersebut, seiring berkembangnya zaman pasar terapung sudah berevolusi menjadi sebuah bangunan-bangunan tetapi masih berada di atas sungai atau danau, hanya saja sedikit modern dari sebelumnya, dan proses transaksi pasar terapung yang beroperasi di dalam bangunan ini tidak jauh berbeda dengan pasar terapung yang menggunakan sampan, proses jual belinya juga masih sama.

Adapun bentuk-bentuk pasar terapung merupakan pasar yang menawarkan segala jenis barang, pangan hingga jasa dan dimana pasar tersebut juga merupakan pasar yang transaksinya para pedagang dan para penjual bertemu

langsung, dan juga di pasar terapung juga bisa kita lihat sistem tawar-menawar sehingga pasar terapung kalau kita samakan lebih dominan ke pasar tradisional dan bukan ke pasar modern.

c. Pengelolaan Pasar Terapung

Pengelolaan pasar terapung oleh masyarakat sekitar dan para pedagang yang berjualan di pasar tersebut yang bertujuan untuk menjaga kelestarian pasar terapung dan juga menjadi salah satu sumber pendapatan atau aktivitas perekonomian masyarakat dalam hal perdagangan, bukan hanya menjadi tempat berdagang tetapi pasar terapung juga digunakan masyarakat menjadi tempat wisata, dan dapat kita lihat di Kalimantan yang merupakan kota dimana pasar terapung pertama kali di lestarikan. pengembangan destinasi wisata ini juga telah didukung oleh pemerintah pusat dengan menetapkan pasar terapung sebagai salah satu tempat wisata nasional di Indonesia.

6. Relokasi

a. Pengertian Relokasi

Menurut Sari (2006:2) Relokasi adalah membangun kembali perumahan, harta kekayaan, termasuk tanah produktif, dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Dalam relokasi adanya objek dan subjek yang terkena dampak dalam perencanaan dan pembangunan relokasi.

Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dan dengan pertimbangan tertentu, dan biasanya relokasi dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang baru seperti suasana baru dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya relokasi misalnya seperti

tempat itu sudah tidak layak pakai, mengganggu masyarakat, merusak sarana dan prasarana publik dan banyak hal lain yang menjadi faktor mengapa relokasi itu dilakukan. (Hasan Ismail, 2018)

b. Tujuan Relokasi

Indonesia dapat dikatakan sering melakukan relokasi, dan salah satunya relokasi yang dilakukan pemerintah yaitu merelokasi pasar, relokasi pasar yang dilakukan pemerintah untuk menjaga sarana dan prasarana yang sering kali terganggu dengan banyaknya pasar-pasar yang tempatnya tidak strategis seperti berada di pinggir jalan yang membuat macet, dan juga banyak sekali para pedagang yang tidak bisa untuk menjaga kebersihan dan lagi relokasi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian daerah dan mencakup bidang tata ruang dalam suatu daerah agar tetap terjaga dan relokasi tersebut dilakukan dengan alasan tempat yang lama tidak mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Relokasi

Relokasi merupakan pemindahan tempat dari satu titik ke titik yang lain yang bertujuan untuk suatu hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya, seperti bertujuan meningkatkan ekonomi, menjaga ketertiban dan yang lain, dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi relokasi yaitu

1. Faktor rendahnya pengunjung
2. merusak keindahan infrastruktur
3. Mengembangkan dan memperluas usaha
4. Tempat lama tidak strategis.
5. Terjadi bencana, seperti kerusakan hingga kebakaran pasar.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan, dimana topik yang di kaji memiliki persamaan dan merupakan bukti bahwa penelitian serupa sudah pernah dilakukan dan layak untuk di teliti kembali dengan perbedaan subjek, objek serta teknik penelitian yang digunakan sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang baru, penelitian terdahulu dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel . I.II. : Penelitian Terdahulu yang relevan

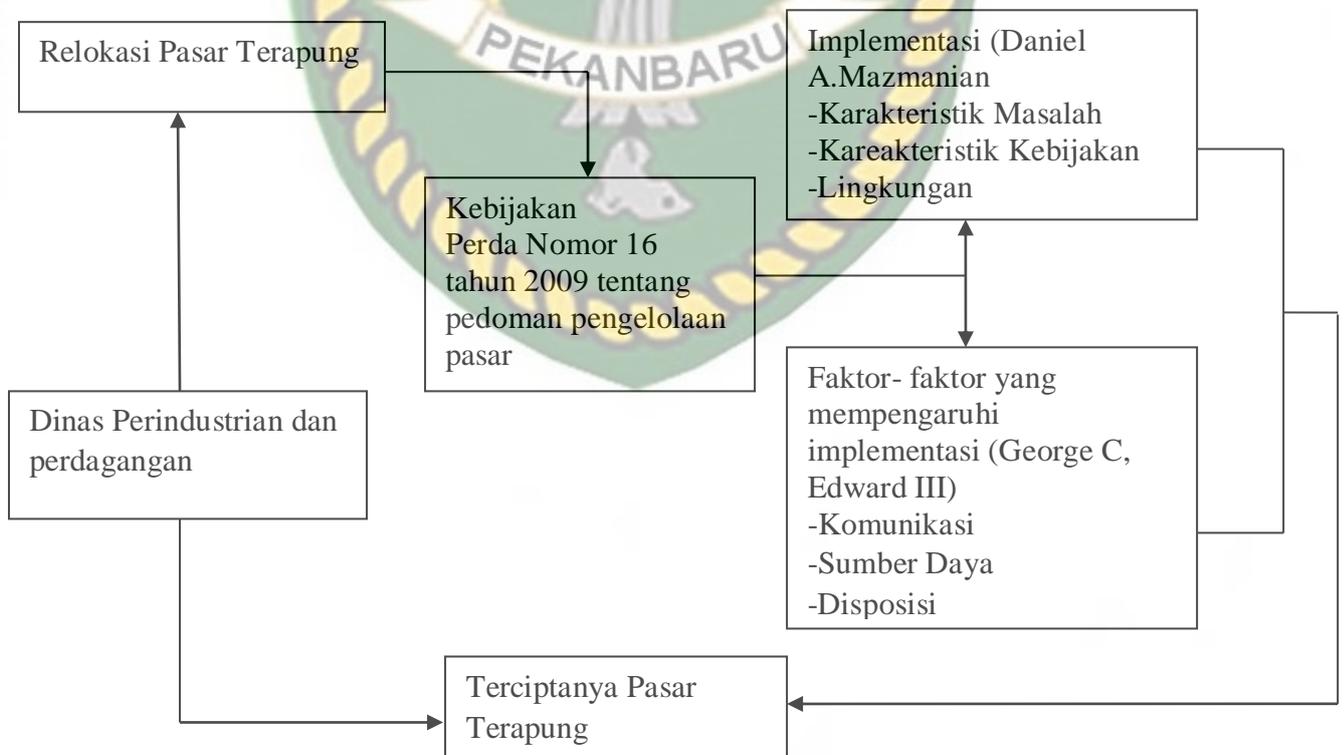
No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Maesellus H.M.Djanga (2016)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Dalam Relokasi Pasar Tradisional(studi kasus pelaksanaan relokasi pasar inpres bajawa, kabupaten ngada, provinsi NTT)	Implementasi kebijakan relokasi pasar, penelitian di pengaruhi beberapa faktor	Tempat dan daerah penelitian berbeda, faktor mengapa dilakukan relokasi pasar berbeda
2	Muhammad Sofyan (2017)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan(Studi kasus relokasi pedagang kaki lima pusat pasar medan dan sekitarnya)	Kebijakan dan relokasi pasar, serta lebih kepada evaluasi kebijakannya yang di bahas	Fator yang mempengaruhi sehingga di akukan relokasi,tempat dan daerah
3	Michael Rakinaung (2018)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Tobelo Kabupaten Halmahera Utara	Meneliti implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar, dan menggunakan metode kualitatif,	Faktor yang menjadi alasan relokasi pasar dilakukan,Tempat dan daerah

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Nove Mustafa (2011)	Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Pagi di Kabupaten Grobongan	Tentang relokasi pasar, metode kualitatif, faktor yang mempengaruhi di lakukan relokasi	Tempat dan daerah penelitian, Tujuan relokasi
5	Andrian Yoro Nalen (2016)	Menakar Pemanfaatan Modal Sosial Adat Hibua Lamo Dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Rawajaya Ke Pasar Wko Di Kabupaten Halmahera Utara	Menggunakan metode kualitatif, implementasi kebijakan,	Tempat dan daerah penelitian, dalam penelitian ini sudah memiliki tempat tujuan relokasi pasar

C. Kerangka Pikir

Tujuan dan proses yang di harapkan dalam penelitian ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan demi tercapainya relokasi pasar terapung dan terciptanya pasar terapung yang telah di rancangan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat untuk pengimplementasian pasar tersebut ke tempat yang lebih layak. Ada pun kerangka pikiran berdasarkan pemikiran di atas yang terkait dan berhubungan dengan proposal penelitian skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Relokasi Pasar Terapung Selodang Kelapa di Kabupaten Indragirir Hilir” Akan penulis sajikan seperti pada gambar berikut:

Gambar I.I Kerangka Pikir Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Terapung Di Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Terapung Di kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan untuk mempermudah pemahaman agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penelitian maka inilah konsep-konsep yang akan penulis operasionalkan

1. Konsep pemerintah merupakan wewenang atau kekuasaan untuk memerintah suatu wilayah, daerah, dan negara dan secara luas pemerintahan di lakukan oleh Trias politika yaitu terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam suatu negara untuk mewujudkan tujuan negara yang telah di rancangan.
2. Konsep Pemerintahan Daerah merupakan hak dan wewenang yang telah di serahkan kepada daerah untuk dijalankan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu, dan juga merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah yang di jalankan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan memegang prinsip-prinsip otonomi.
3. Konsep Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan kebijakan yang telah di buat yang di arahkan untuk tercapainya segala tujuan-tujuan yang sudah di rancangan dalam keputusan kebijakan.
4. Konsep Implementasi Kebijakan Publik merupakan kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau

kebijakan secara umum dan juga merupakan suatu program pencapaian tujuan dan nilai-nilai tertentu.

5. Konsep Relokasi Pasar merupakan pemindahan suatu tempat ketempat yang lain dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dan dengan pertimbangan tertentu, dan lagi relokasi dilakukan karena memiliki beberapa faktor yang membuat relokasi itu terjadi dan tujuan relokasi pada umumnya untuk menjakan suatu daerah atau wilayah itu menjadi lebih baik lagi
6. Konsep pasar merupakan tempat di mana para pedagang dan para pembeli melakukan transaksi berupa jual beli yang di mana jual beli di lakukan dengan menggunakan uang dan juga kita dapat melihat di pasar ada juga yang menawarkan bukan hanya barang melainkan juga jasa. Hanya sedikit berbeda dengan zaman dahulu yang dimana masyarakat dahulu melalkukan jual beli dengan cara barter.
7. Konsep Pasar Terapung merupakan pusat perbelanjaan yang di lakukan di atas sungai atau danau yang di mana para pedagang berjualan menggunakan sampan atau perahu, di dunia pasar terapung yang sangat terkenal berada di thailand kerana sebagian wilayah di thailand merupakan perairan, indonesia juga memiliki pasar terapung yang terletak di beberapa daerah dan pasar terapung yang cuku besar dan terkenal berada di banjarmasin.

E. Oprasional Variabel

Tabel II .II : Konsep Oprasional Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Relokasi Pasar Terapung

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
<p>- Menurut daniel A. Mazmanian dan paul sabatier (1979) implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian</p>	Implementasi Kebijakan	1. Karakteristik dari masalah.	<p>-Mengetahui apa bentuk permasalahan yang ada</p> <p>-mengindetifikasi masalah,</p> <p>-memahami langkah apa yang harus di ambil dalam menyelesaikan masalah.</p>
		2.karakteristik kebijakan	Memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang digunakan sesuai dengan permasalahan, agar setiap masalah dapat terselesaikan dan juga memastikan yang terjadi sebenarnya.
		3. Lingkungan	Memastikan bahwa kondisi tempat yang menjadi target kebijakan sesuai dengan kebijakan yang akan di turunkan atau di laksanakan,dan juga memastikan bahwa kebijakan yang di buat dan dilaksanakan dapat meneyelesaikan permasalahan yang ada
<p>-Menurut George Edward III Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan</p>	Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi	<p>Mendengarkan.memban</p> <p>ca.mengindetifikasi, memahami maksud dan tujuan, komunikasi yang jelas dan baik</p>



	2. Sumber daya,	Memastikan bahwa SDM yang merupakan anggota atau pekerja memiliki kemampuan dan kinerja yang bagus dan baik dan terlebih yang paling penting kejujuran yang terutama
	3. Disposisi,	Memastikan bahwa keberlangsungan pelaksanaan ini dilakukan dengan jujur, adil agar terwujud sistem demokrasi yang sehat
	4. Struktur birokrasi,	Memastikan bahwa struktur dan sistem yang digunakan sudah sesuai dengan aturan yang telah dibuat sehingga terlaksana dengan baik

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang merupakan penelitian yang mendeskripsikan variabel yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis sehingga dalam penelitian ini penulis harus dapat mendeskripsikan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam penelitian ini, di dalam melakukan penelitian haruslah mengetahui serta mengerti tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya, maka penelitian ini sangat tepat menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dimana deskriptif merupakan metode yang memiliki tujuan menjelaskan peristiwa tertentu yang sedang terjadi di masa ini atau di masa yang sudah lewat dan penelitian ini merupakan penelitian dengan cara menafsirkan dan menguraikan data yang sudah ada dan bersamaan dengan fenomena dan situasi yang saat ini sedang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian penulis yaitu di dinas perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) yang menangani pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan di Tembilahan Kota, selanjutnya penelitian akan dilakukan juga di pasar terapung yang berada di jalan Yos Sudarso Tembilahan, dan juga penulis akan melakukan penelitian di tempat penampungan sementara (TPS), dan juga penulis akan meneliti ke tempat-tempat

para pedagang yang berjualan di pinggir jalan di sekitaran daerah pasar terapung tersebut.

C. Informan Penelitian

1. Perancangan Informan

Untuk mengetahui dan menentukan informan dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik purposive dalam penentuan informan yang akan menjadi narasumber yang memiliki informasi sesuai dengan tema penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian, yaitu dengan memilih informan yang mengetahui dan ikut bertanggung jawab dalam relokasi pasar dan merupakan orang yang terkait dengan subjek dan objek dalam penelitian ini.

2. Informan

Adapun yang menjadi informan dan narasumber dalam penelitian ini adalah dari pihak yang sangat memahami dan merupakan orang-orang yang ikut dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar tersebut yaitu:

1. Key Informan atau (Informan kunci) merupakan orang yang menjadi narasumber utama dalam penelitian ini dan merupakan orang yang ikut serta dalam pengimplementasian kebijakan pasar terapung selodang kelapa di kabupaten indragiri hilir tersebut, merupakan orang yang menjadi sumber informasi yang mengetahui segala sesuatu tentang relokasi pasar yang akan dilaksanakan tersebut sebagai subjek utama yang memiliki informasi yang akurat mulai dari data, peraturan dan kebijakan hingga kegiatan lapangan yang akan dan yang sudah di

lakukan, dan yang juga dapat menghandel segala kegiatan dan pergerakan proses relokasi tersebut, dan menjadi key informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir dan juga Kepala Bidang Pasar Kabupaten Indragiri Hilir mereka ini merupakan orang-orang yang memiliki informasi yang penulis butuhkan.

2. Informan Tambahan. yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah mereka yang sedikit banyaknya mengetahui atau ikut dalam perelokasian pasar terapung selodang kelapa tersebut, dan mereka yang juga ikut dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dan juga orang-orang yang beraktifitas di pasar tersebut atau orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar pasar tersebut, informan tambahan ini untuk memperkuat hasil penelitian ini, yaitu Pedagang pasar terapung di kabupaten Indragiri Hilir dan masyarakat sekitar pasar terapung.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan failed dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang di proleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan untuk mencari data yang di butuhkan, salah satunya dengan memberikan pertanyaan kepada informan dan nantinya akan di jawab oleh informan mengenai relokasi pasar terapung di kabupaten indragiri hilir dan yang dikatakan informan di sini adalah

kepala Dinas perindustrian dan perdagangan, Kepala bidang pasar dan para perdagangan dan para pedagang di pasar terapung serta para warga yang tinggal di sekitar pasar terapung di kabupaten indragiri hilir Tembilahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung dari pihak pertama dalam pemberi informasi, dan data tersebut bisa berupa file, dokumen, gambar, tabel, grafis, serta laporan tertulis, dan biasanya data data ini di dapat melalui dinas-dinas tertentu, yang berhubungan dengan penelitian penulis yang menjadi data pendukung seperti:

- a. Data tentang berapa jumlah kios yang masih beroperasi di pasar terapung
- b. Data tentang konsep kerja disperindag dalam merelokasi pasar terapung
- c. data-data peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang di perlukan dalam penelitian ini maka penulis mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (interview) dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung dengan narasumber yang ingin di tanyai mengenai bahan penelitian yang tentunya narasumber ini merupakan orang yang tau tentang permasalahan atau bahan penelitian ini, dalam wawancara ini yang sangat di utamakan adalah informasi dan keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan di teliti, dalam wawancara ini penulis merupakan orang yang memberikan pertanyaan dan narasumber merupakan orang yang akan menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang di lontar kan oleh peneliti, di lakukannya teknik wawancara ini agar penulis bisa mendapatkan data yang pasti dan nyata dan juga dengan wawancara ini penulis bisa mendapatkan data yang lebih banyak lagi.

2. Observasi (pengamatan). Teknik kedua yang digunakan peneliti Dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengamatan ke tempat di mana penulis akan meneliti atau mengamati dan melihat secara langsung lokasi penelitian, dan observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang bisa di katakan akurat, karena teknik pengumpulan ini dapat mengetahui yang sesungguhnya terjadi karena langsung terjun ke lapangan atau tempat penelitiannya langsung, sehingga nantinya data yang di dapat melalui observasi langsung ini merupakan data yang pasti, pengamatan ini yang nantinya dapat kita lihat kesesuaiannya dengan kebijakan yang sudah di ambil dengan fakta yang sebenarnya terjadi.
3. Dokumentasi, Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan hal-hal yang terjadi dalam bentuk file, data-data yang di perlukan dan proses dalam penelitian merupakan data yang nantinya dapat menjawab segala pertanyaan yang ada dalam penelitian ini, maka dari itu penulis harus memahami hal-hal apa saja yang harus di dokumentasi kan sehingga menghasilkan data yang akurat dan pasti, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengambilan data-data berupa file, dokumentasi, catatan, administrasi yang sesuai dengan masalah dalam penelitiannya, dan data-data ini juga di dapat

dari lembaga yang diteliti dan merupakan data yang diperoleh dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen di lembaga tersebut dan dokumennya bisa berbentuk tabel, gambar, tulisan atau lain-lain. (Hamidi, 2010)

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi yang mana data diperoleh dengan cara menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data dengan data yang sudah ada dan teknik ini merupakan pengumpulan data yang menciptakan data yang benar-benar akurat. (B.Miles, 2009)

Analisis data merupakan pengelompokan yang dimana nantinya data-data tersebut akan diurutkan, sehingga mempermudah penulis pada saat mencari datanya karena sudah terurut dan sudah dikelompokkan, dan juga membuat data tersebut mudah untuk dibaca, data yang akan dianalisis merupakan data yang dapat melalui wawancara dan observasi yang sudah dilakukan sehingga datanya merupakan data yang sudah pasti.

Menurut Sugiyono (2010:338) Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu

1. Reduksi Data.

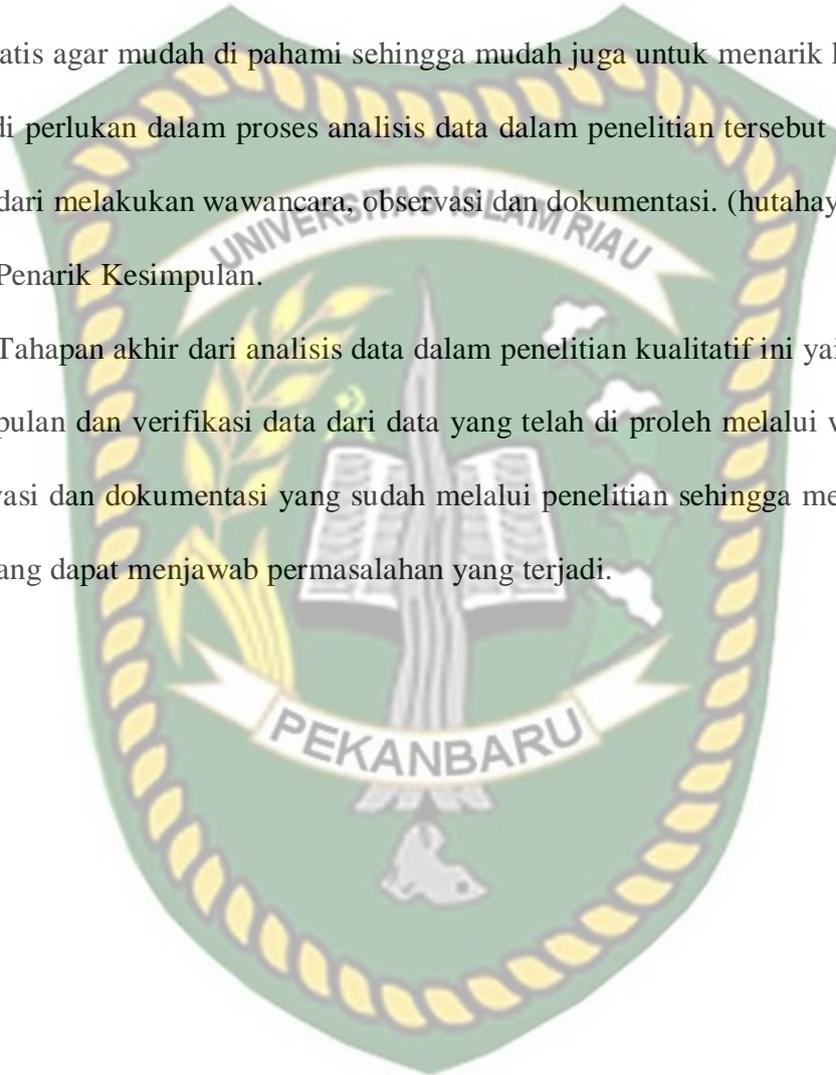
Merupakan tahapan teknik analisis data dimana data tersebut disederhanakan sedemikian rupa membuang data-data yang dianggap tidak diperlukan agar memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan dengan data yang sudah dirangkum yang memiliki makna yang kuat untuk penelitian tersebut.

2. Display Data (penyajian data).

Merupakan tahapan teknik analisis data yang dimana penyajian data tersebut di lakukan untuk membuat data-data yang akan di gunakan tersusun secara sistematis agar mudah di pahami sehingga mudah juga untuk menarik kesimpulan yang di perlukan dalam proses analisis data dalam penelitian tersebut dan data di dapat dari melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. (hutihayan, 2019).

3. Menarik Kesimpulan.

Tahapan akhir dari analisis data dalam penelitian kualitatif ini yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi data dari data yang telah di peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah melalui penelitian sehingga menghasilkan data yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi.



G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.I Tabel jadwal kegiatan penelitian tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar terapung di Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan.

NO		Desember	Januari	Februari	Maret	April	Agustus	September
1	Persiapan dan penyusunan UP							
2	Seminar UP							
3	Perbaikan							
4	Pengurusan rekomendasi penelitian(riset)							
5	Penelitian lapangan							
6	Penelitian dan analisis data							
7	Penyusunan laporan penelitian (Skripsi)							
8	Konsultasi perbaikan skripsi							
9	Ujian skripsi							
10	Revisi dan pengesahan skripsi							
11	Penggandaan serta penyerahan skripsi							

Sumber: Olahan Penulis, 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai keadaan, situasi, luas, letak dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk mengetahui lebih lagi mengenai daerah, lokasi atau tempat yang akan menjadi objek dalam penelitian ini. Gambaran secara umum lokasi penelitian meliputi keadaan geografis, luas wilayah, pemerintah, instansi, serta struktur organisasi, dan juga tugas-tugas dan fungsi kerja di Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dan Pasar terapung selodang kelapa Kabupaten Indragiri Hilir.

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih di kenal dengan sebutan negeri seribu parit atau negeri seribu jembatan, kabupaten indragiri Hilir ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai, dimana alat transportasi yang sering digunakan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya yaitu perahu, sampan, speed bot dan pompong di karenakan sebagian dari daerah indragiri Hilir adalah sungai, ada beberapa sungai di kabupaten Indaragiri Hilir antara lain sungai luar, sungai perak dan sungai yang terbesar yaitu sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pegunungan bukit barisan(danau singkarak)

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas daratan 11.605,97 km²dan memiliki 31 pulau. Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 740.598 jiwa yang terdiri atas

379.805 jiwa penduduk laki-laki dan 360.793 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019, penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,27. Ibu kota Indragiri Hilir yaitu Kota Tembilahan yang memiliki luas wilayah 197,37 km² yang terdiri dari 6 Desa/kelurahan.

1. Letak Kabupaten Indragiri Hilir

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 0⁰36' Lintang Utara dan 1⁰ 07' Lintang Selatan, dan antara 104⁰ 10' - 102⁰ 32' Bujur Timur.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Indragiri Hilir berada di pantai timur pulau Sumatera yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi.

2. Batas

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
- c. Sebelah Barat : kabupaten Indragiri Hulu
- d. Sebelah Timur : Tanjung Balai karimun (Provinsi Kepulauan Riau)

B. Pemerintahan

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang No.6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 Juni 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun 2005 wilayah

administrasi Pemerintahan daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan, 174 Desa.

Pada tahun 2011, jumlah Kelurahan, Desa di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penambahan karena adanya pemekaran Desa yaitu menjadi 203 Desa, 33 Kelurahan. Penambahan jumlah Desa, Kelurahan ini disebabkan karena adanya pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4, 5, 6 Tahun 2011. Perda Nomor 4 mengatur mengenai perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan. Jumlah Desa yang berubah status sebanyak 4 Desa. Perda Nomor 5 mengatur tentang pembentukan Kelurahan baru karena adanya pemekaran Kelurahan. Perda Nomor 6 mengatur tentang pembentukan Desa baru karena adanya pemekaran Desa.

Pada tahun 2014 terdapat perubahan status kembali dari Desa menjadi Kelurahan, Jumlah Desa berkurang menjadi 197 Desa, sehingga Kelurahan bertambah menjadi 39 Kelurahan.

Tabel III.II : Data Nama Kecamatan Beserta Luas, Jumlah Kelurahan dan jumlah Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir.

NO	Nama Kecamatan	Luas	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Tembilahan	15.164 km ²	8	-
2.	Tembilahan Hulu	13.899 km ²	2	4
3.	Keritang	94.642 km ²	1	16
4.	ReteH	53.183 km ²	3	11
5.	Enok	880,86km ²	4	10
6.	Tanah Merah	47.660 km ²	1	9
7.	Kuala Indragiri	71.495 km ²	1	7

8.	Tempuling	75.287 km ²	4	5
9.	Batang Tuaka	39.118 km ²	1	12
10.	Gaung Anak Serka	64.995 km ²	3	9
11.	Gaung	207.617 km ²	1	15
12.	Mandah	174.273 km ²	1	16
13.	Kateman	48.781 km ²	3	8
14.	Kemuning	104.984 km ²	1	11
15.	Pulau Burung	58.050 km ²	-	14
16.	Pelangiran	85.396 km ²	1	15
17.	Teluk Belengkong	42.774 km ²	-	13
18.	Concong	26.348 km ²	1	5
19.	Kempas	58.453 km ²	2	10
20.	Sungai Batang	40.489 km ²	1	7

Sumber :Draft RTRW INHIL 2011-2031

Sejak November 2013, Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Drs. H. M. Wardan Dan Rosman Malomo sebagai wakil, dan di tahun 2018 Drs. H. M. Wardan kembali menjabat sebagai Bupati kabupaten indragiri Hilir dan H. Syamsudin Uti sebagai wakil di Periode kepemimpinan 2018-2023.

C. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah yang ada di provinsi Riau yang memiliki pasar terapung yang merupakan pasar tradisional yang masih ada sampai saat ini yang di kelola oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

a. Tugas

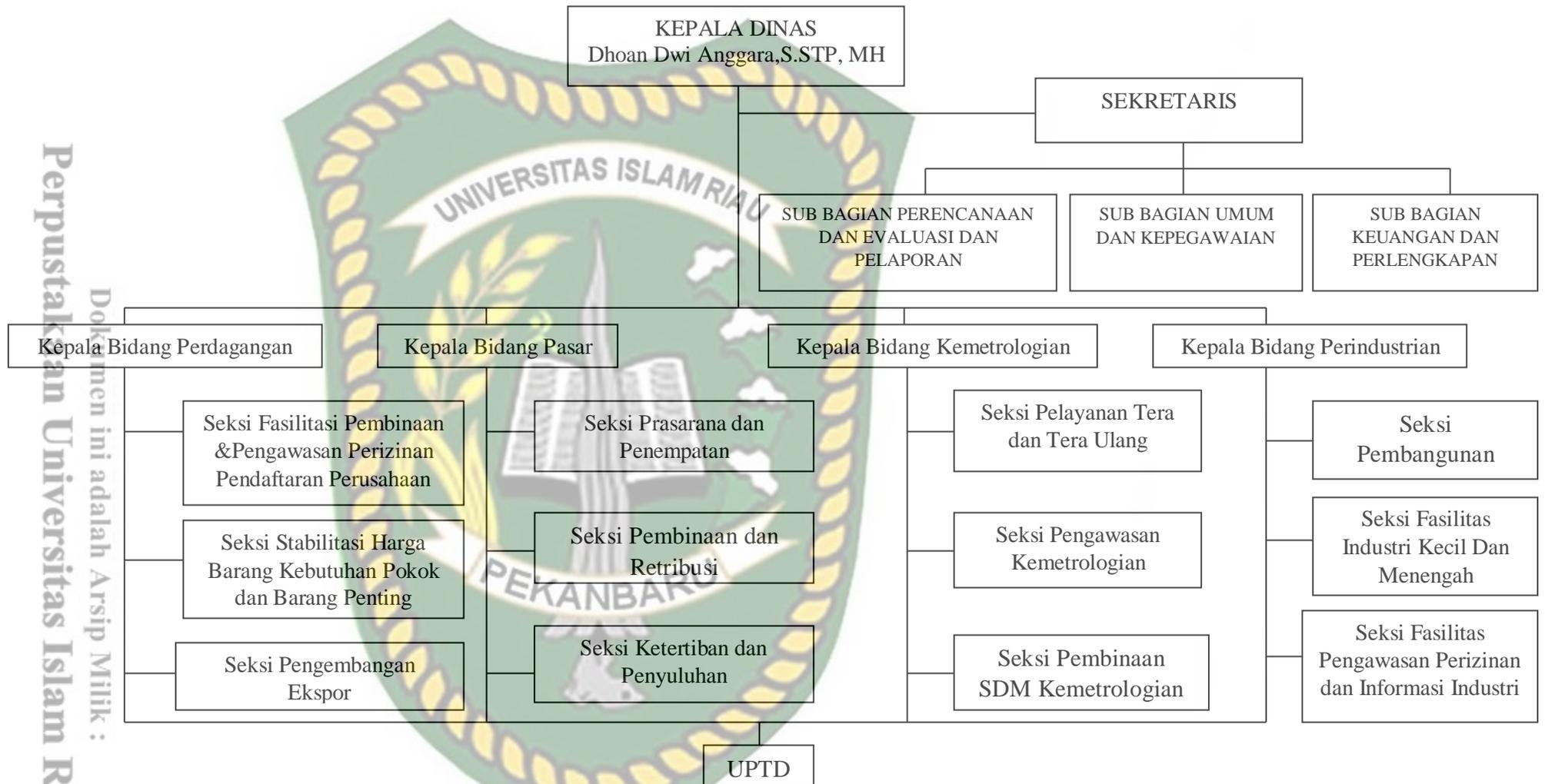
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, perindustrian dan pengelolaan pasar.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan pelayanan publik di bidang perdagangan, industri dan pengelolaan pasar.
 - 2) Mendorong pelaksanaan tugas di sektor yang mencakup perdagangan, industri, dan manajemen pasar.
 - 3) Pelaksanaan urusan Tata usaha Dinas.
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsi dalam rangka kemudahan pelaksanaan tugas.
2. Dinas perdagangan dan perindustrian merupakan instansi yang berdiri dari berbagai bidang hingga bagian-bagian yang dimana memiliki tugas dan fungsinya masing-masing tetapi tetap satu tujuan.

Berikut Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir:

Gambar I.II : Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir



D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah di provinsi riau yang juga memiliki polisi daerah atau yang biasa kita sebut dengan polisi pamong praja yang bertugas untuk menjalankan tugas tugas negara mulai dari menjaga, mengawasi daerah, polisi pamong praja merupakan salah satu perangkat daerah

1. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu;
 - a. **Tugas** : Menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
 - b. **Fungsi**
 - 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah ;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah ;
 - 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
 - 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya ;
 - 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang terdiri dari berbagai bidang hingga bagian-bagian yang dimana memiliki tugas dan fungsinya masing-masing tetapi tetap satu tujuan.

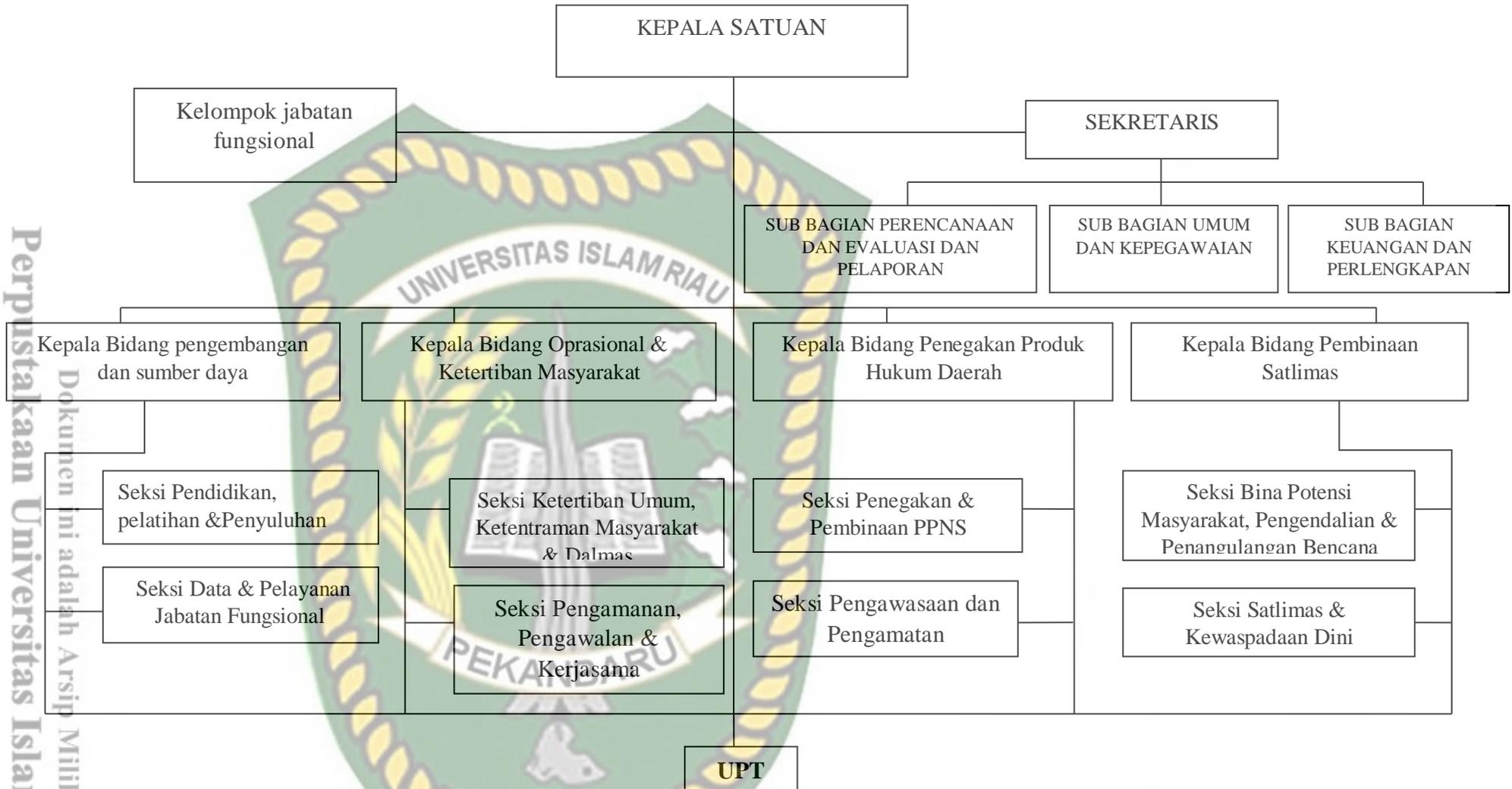
Berikut Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar II.I : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir



E. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir.

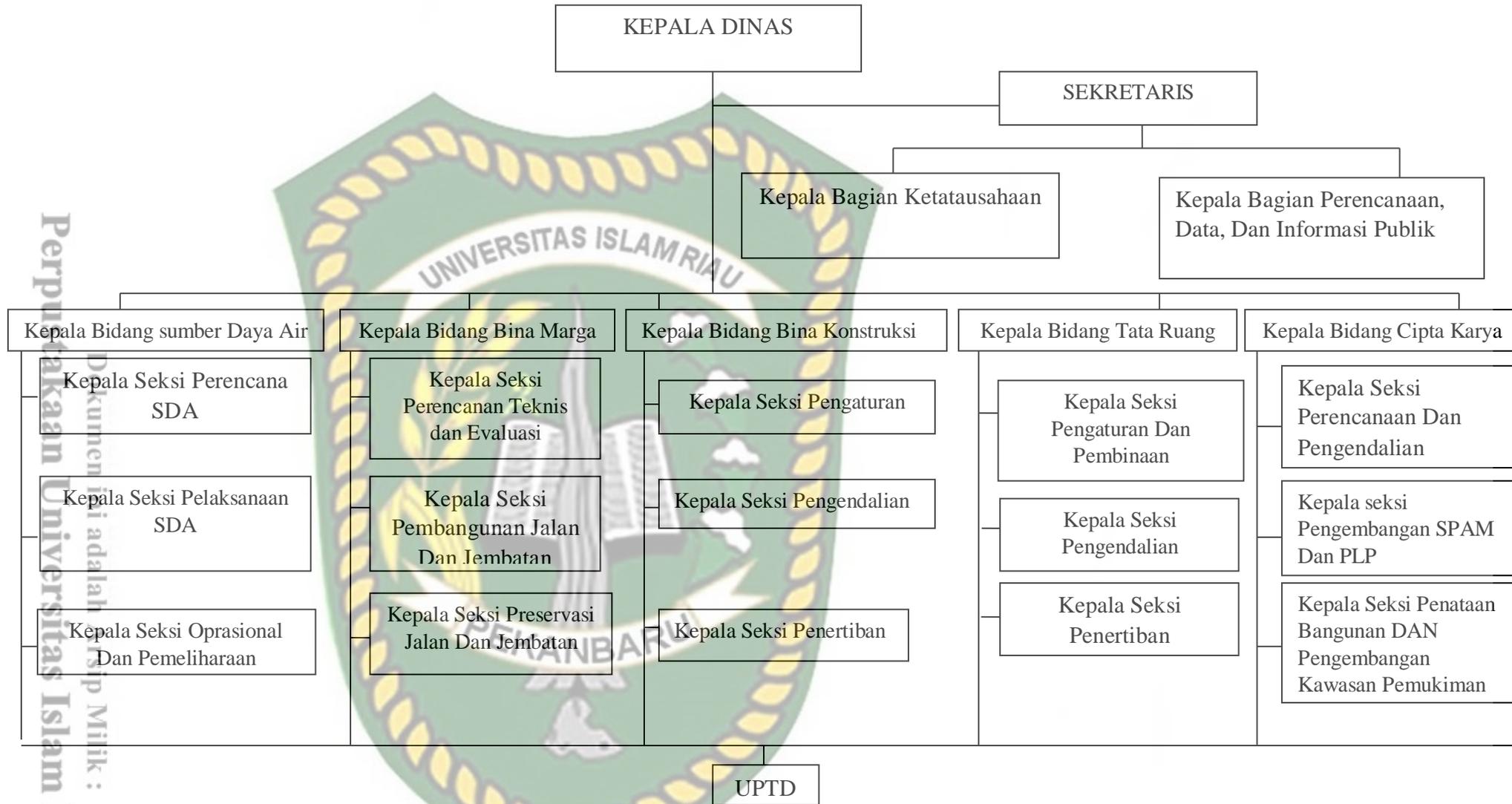
Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah di provinsi Riau yang juga memiliki Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang yang berwenang mengatur tata letak sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pemerintah dan PUTR juga bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan sarana daerah baik dari seperti pemeliharaan jalan di Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Berdasarkan peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas pekerjaan umum dan tata ruang.
 - a. **Tugas** : Membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. **Fungsi** :
 - 1) Perumusan kebijakan pada sekretariat, Bidang Sumber Daya air, Bidang Bina Marga, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Cipta Karya.
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan pada sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Cipta Karya.

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Bina Knstruksi, Bidang Tata Ruang, dan Cipta Karya.
 - 4) Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Cipta Karya; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang.
2. Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragirir Hilir merupakan instansi yang terdiri dari berbagai bidang hingga bagian-bagian yang dimana memiliki tugas dan fungsinya masing-masing tetapi tetap satu tujuan.
- Berikut Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten IndragiriHilir:



Gambar I.II : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber data primer. Narasumber berasal dari instansi dan badan yang bersangkutan, adapun yang dimaksudkan adalah Dinas perdagangan dan perindustrian, pedagang pasar terapung selodang kelapa dan masyarakat sekitar pasar tersebut. Narasumber dibagi menjadi dua bagian yaitu keyinforman dan informan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hasil penelitian lapangan, berikut akan dibahas mengenai identitas dari narasumber yang terlibat di dalam proses relokasi pasar tersebut.

a. Jenis kelamin Narasumber

Dalam penelitian penulis melakukan wawancara kepada 3 narasumber dari instansi berbeda, apabila dibuat dalam bentuk tabel berdasarkan jenis kelamin maka sebagai berikut:

Tabel IV.I Jenis Kelamin Narasumber

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	8
2	Perempuan	2
Jumlah		7

Sumber: Olahan penulis 2021

b. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur informan sangat mempengaruhi kemampuan setiap individu dalam berfikir dan bertindak, karena semakin tinggi umur seseorang maka akan banyak pula pengalaman yang dimilikinya. Oleh karena itu semakin banyak pengalaman seseorang maka semakin selektif dalam menentukan keputusan, berpendapat dan untuk bertindak atau bertingkah laku jika dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Umur responden pada penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel VI.II : Identitas Informan Berdasarkan Umur

NO	Tingkat Umur	Jumlah
1	21-30	0
2	31-40	4
3	41-50	2
4	>51	4
Jumlah		10

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

c. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat berpengaruh pada proses penungkatan sumber daya manusia karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan yang lebih tinggi pada pembelajaran yang akan diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang pendidikannya lebih rendah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel V.I : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA	3
2	Strata Satu (S1)	5
3	Strata Dua (S2)	2
	Jumlah	10

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

d. Jenis Pekerjaan Narasumber

Dalam melakukan penelitian lapangan jenis pekerjaan narasumber memengaruhi kapabilitas mereka sebagai narasumber, adapun jenis pekerjaan dari narasumber yang diwawancarai peneliti adalah:

Tabel V.II: Identitas Informan Berdasarkan Profesi

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	5
2	Pedagang	5
	Jumlah	10

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Terapung

Selodang Kelapa

1. Karakteristik Masalah Dalam Impelementasi Kebijakan Relokasi Pasar Terapung

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dari keyinforman dalam penelitian ini yaitu Bapak Ahmad Fitri, S.Sos selaku kepala bidang pasar di dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Rabu, 1 September 2021 mengatakan bahwa;

Hanya sebagian pedagang yang setuju untuk di relokasi, itu karena meja mereka yang ambruk, pasca ambruk pertama sekitar 25 meja pedagang yang jatuh ke sungai dan yang kedua kira-kira jadi 40 meja pedagang yang jatuh kesungai, sehingga membuat lobang di lantai pasar semakin besar, jadi pasar tersebut masuk dalam kategori bangunan yang tidak layak untuk digunakan, karena berbahaya bau untu para pedagang juga untuk para pengunjung, tapi hingga saat ini para pedagang masih banyak yang masih berjualan di bangunan lama disekitar bagian depan pasar, padahal TPS sudah hampir selesai walaupun jumlah TPS saat ini masih kurang untuk menampung seluruh pedagang, tetapi kami mengutamakan para pedagang ikan dan daging untuk direlokasi, mereka tidak mau pindah dengan alasan posisi meja TPS yang tidak strategis karena terlalu kebelakang, dan juga karena saluran pembuangan di TPS tersebut yang belum ada sehingga membuat genangan air limbah yang bau, untuk genangan air tersebut kami juga sedang mengupayakan nya, karena kami juga mendapatkan komplek dari para penduduk sekitar karena terkena dampak dari limbah tersebut.

Diketahui bahwa para pedagang tidak mau untuk dipindahkan dengan alasan Meja TPS yang dibangun oleh pemerintah tidak strategis karena memang posisi beberapa meja membelakangi jalan pasar, dan juga mereka tidak mau dipindahkan karena air limbah dari ikan dan daging yang tergenang karena belum adanya saluran pembuangan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal saluran pembuangan ini juga mendapat komplek dari masyarakat yang tinggal di sekitar pasar.



Selanjutnya menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan H. Tarudin, SE selaku Seksi prasarana dan Penempatan di Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Kamis, 2 September 2021 mengatakan bahwa;

Pada awal kejadian ambruknya lantai pasar terapung lalu seharusnya dari awal jika para pedagang mau di relokasikan ke pasar pagi dan pasar kayu jati mereka tidak perlu bertahan dengan meja tempel seperti yang mereka pakai saat ini, sementara tercatat kurang lebih ada 50 meja yang kosong di pasar kayu jati dan ada 26 meja yang tidak terpakai di pasar pagi, tetapi mereka enggan untuk di pindahkan ke sana dengan alasan pasar tersebut jauh dari sungai dimana mereka mendapatkan ikan atau mereka membeli ikan, sehingga kami juga tidak bisa memaksa mereka, dan juga dengan bangunan TPS ini masih ada pedagang yang tidak mau di pindahkan dengan alasan meja yang di buat tidak kokoh, posisi yang terlalu di belakang dan posisi yang membelakangi jalan sehingga para pedagang masih bertahan berjualan di bangunan lama yang kita tau bangunan itu sangat berbahaya bagi para pedagang dan para pengunjung.

Berdasarkan Wawancara ini, dinas perdagangan dan perindustrian dari awal kejadian ambruknya lantai pasar tersebut langsung melakukan kunjungan ke pasar tersebut, dan memberikan pengarahan kepada para pedagang yang mejanya di sekitar lantai yang ambruk untuk tidak berjualan terlebih dahulu, dan telah memberikan kebijakan untuk merelokasi para pedagang ke pasar-pasar yang ada di Indragiri Hilir yang masih banyak kosong dan tidak di gunakan, tetapi tidak diindahkan para pedagang tersebut.



Sementara itu hasil wawancara dengan pedagang pasar terapung selodang kelapa yaitu bapak Alfian pedagang yang meja dagangannya ambruk pasca pada awal kejadian, pada 4 september 2021 mengatakan;

Tidak tanggap cepat pemerintah pasca ambruk pasar tu, dari 2016 amruk pasar ini selama tiga tahun lebih tidak ada tindakan dari pemerintah untuk memperbaiki atau membangun kan tempat sementara bagi kami, meja tempel yang kami pakai selama ini meja buat sendiri. Lama menderita di dalam tu dengan meja tempel, dan selalu was-was takut ada rubuh susulan, seakan tidak peduli, kebijakan pemindahan ini pun tidak jelas, tidak ada di diskusikan atau membuat kesepakatan dengan pedagang-pedagang disini.

Dari wawancara ini diketahui bahwa pemerintah tidak langsung menindak pemersalahan ambruknya lantai pasar terapung tersebut, sehingga selama 3 tahun lebih para pedagang harus menunggu hingga adanya pembangunan, sehingga para pedagang terpaksa bertahan berjualan dipasar tersebut dengan menggunakan meja tempel yang dibuat sendiri, dan setiap saat harus tetap waspada karena takut akan ada ambruk susulan lagi.

Sementara itu hasil wawancara dengan pedagang pasar terapung selodang kelapa yaitu bapak Yogi Amdani pedagang yang meja dagangannya ambruk pasca pada awal kejadian, pada 4 september 2021 mengatakan;

Lama kami menderita seperti ini, dari 2016 sekitar hampir 4 tahun baru ada kejelasan TPS ni di bangun, terlalu lama kerja pemerintah ini, setelah di bangun ini masih banyak tidak dapat tempat, dan ada beberapa meja yang belum digunakan tapi besinya udah bengkok-bengkok jadi pedagang disini tidak mau dipindahkan, mereka lebih milih jualan di sekitar pasar lama itu dengan meja tempel, ini saja kami jualan disini kami sendiri yang menyemen meja ini, 2 meja ini sampai 5 jutaan menyemennya ni, mau tidak mau, soalnya kami ini sama sekali tidak bisa berjualan di tempat lama lagi, takut juga kalau ada ambruk susulan.

Diketahui bahwa hasil wawancara dari pedagang sebelumnya yang menyatakan sama dengan pedagang ini bahwa kinerja pemerintah sangat lama dalam menanggapi ambruk lantai pasar terapung tersebut, dan tindakan yang di ambil terlalu bertele-tele, dan lagi kualitas TPS yang dibangun juga tidak baik, akibatnya para pedagang harus mengeluarkan biaya lagi untuk meja dagangan mereka masing-masing agar mejanya kuat sehingga mereka harus menyemen meja dagangannya.



2. Karakteristik Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar

Selanjutnya menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan H. Tarudin, SE selaku Seksi prasarana dan Penempatan di Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Kamis, 2 September 2021 mengatakan bahwa;

Dalam relokasi pasar terapung selodang kelapa, kami dinas perdagangan dan perindustrian melakukan relokasi karena beberapa faktor yaitu bangunan pasar terapung tersebut memang tidak layak pakai lagi akibat ambuknya lantai pasar tersebut, dan juga kami melakukan relokasi ini karena terbakarnya pasar terapung selodang kelapa sembako yang menambah jumlah pedagang yang harus di relokasi, dan juga posisi pasar awal yang menyalahi peraturan PUTR nomor 28 tahun 2015 tentang garis sepadan sungai dan sempadan danau tetapi pada saat ini kami memprioritaskan terlebih dahulu para pedagang ikan dan daging untuk di relokasi, dalam hal ini kami dinas perdagangan dan perindustrian melibatkan dinas atau instansi lain dalam kesepakatan pelaksanaan kebijakan relokasi pasar tersebut mulai dari bupati hingga anggota pelaksana relokasi pasar terapung ini. Dalam implementasi kebijakan relokasi pasar terapung selodang kelapa tersebut bupati membentuk tim koordinasi dalam Kpts 135/II/HK-2019 tentang pembentukan Tim koordinasi relokasi pasar terapung yang beranggotakan (terlampir) yang ikut dalam rapat yang diselenggarakan di kantor desa kemarin dan di ikuti oleh peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Diketahui bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mendukung untuk dilakukannya relokasi pasar terapung tersebut, sehingga dinas perdagangan dan perindustrian mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam perda nomor 16 tahun 2009 tentang pengelolaan pasar yang di kelolah oleh pemerintah dan lagi dengan adanya Kpts 135/II/HK-2019 tentang pembentukan Tim koordinasi relokasi pasar terapung selodang kelapa di kabupaten Indragiri Hilir, dengan peraturan itulah dinas perdagangan dan perindustrian merelokasi pasar terapung tersebut dan juga memperhatikan peraturan-peraturan terkait dalam proses

relokasi pasar tersebut seperti memperhatikan batasan-batasan pembangunan yang akan dilakukan.

Selanjutnya hasil wawancara bersama ibu lenny sriayu indriyati. S.T selaku kepala seksi pengendalian di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir pada 14 September 2021 mengatakan bahwa.

Memang benar bahwa dinas perdagangan dan perindustrian sudah mengkoordinasikan ke kami dinas PUTR dan kemarin juga sudah masuk surat izin bangunan yang di serahkan awalnya ke bagian tata ruang, karena itu wewenang kami disini memberikan izin pembangunan, Kalau di atas sungai kan sudah tidak di perbolehkan lagi maka dari itu pembangunan harus dilakukan di darat, maka dari itu mereka juga melakukan koordinasi kepada bidang bina marga, dari dinas PUTR tidak menyarankan jikalau dinas perdagangan dan perindustrian memperbaiki atau membuat kembali bangunan di atas sungai tersebut karena menyalahi peraturan menteri PUPR nomor 28 tahun 2015 itu, adanya bangunan pasar terapung lama ini karena dulu belum ada peraturan yang mengatur tentang garis sempadan sungai ini, dalam peraturan menteri PUPR terdapat pada pasal ke 5 pembangunan boleh dilakukan jika di daerah perkotaan minimal 10 meter dari tepian sungai.

Diketahui dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga membenarkan bahwa adanya keterlibatan dinas pekerjaan umum dan Tata Ruang dalam proses pembangunan hingga proses relokasi pasar tersebut, dalam hal penempatan posisi bangunan yang akan di bangun harus melalui persetujuan dari dinas PUTR apakah tidak menyalahi peraturan-peraturan yang ada, pembangunan pasar tidak lagi dilakukan di atas air karena menyalahi peraturan menteri tentang garis sempadan sungai, dan juga jika pembangunan tetap dilakukan di atas air, bangunan tidak akan bertahan lama.

3. Lingkungan Pasar Yang Menjadi Tempat Relokasi

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dari keyinforman dalam penelitian ini yaitu Bapak Ahmad Fitri, S.Sos selaku kepala bidang pasar di

dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Rabu, 1 September 2021 mengatakan bahwa;

Dari awal pembangunan TPS ini kami sudah meminta izin kepada masyarakat sekitar pasar dan umumnya masyarakat setuju, mereka tidak ada masalah pada awalnya, tetapi setelah dibangun TPS ini ada beberapa masyarakat yang komplek akibat jalan di depan rumah dan toko mereka yang menjadi kecil di tambah lagi limbah air dari para pedagang ikan dan daging yang mengalir ke ruko ruko masyarakat sekitar dan membuat bau, karena belum adanya saluran pembuangan limbah tersebut.

Dari wawancara ini diketahui bahwa pembangunan TPS tersebut menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar, mulai dari jalan depan rumah atau toko mereka menjadi sempit dan juga limbah air pembuangan yang menggenangi di depan-depan rumah masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan komplek dari masyarakat dengan harapan agar pemerintah lebih cepat menangani dampak ini terutama saluran pembuangan limbah dari pasar ikan dan daging ini.



C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Terapung Selodang Kelapa

1. Faktor Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Terapung

Berdasarkan teori Gerge Edward III dalam Agustino (2008: 150) Komunikasi menentukan keberhasilan dari pencapaian tujuan implementasi kebijakan yang akan dilakukan di mulai dari komunikai yang dilakukan untuk mengetahui apa yang akan di kerjakan, dalam indikator komunikasi tersebut memiliki tiga sub indikator yang harus di perhatikan yaitu *Transmisi* (transmission), *Kejelasan* (clarity), dan *Konsistensi* (consistency) dimana dalam setiap informasi yang di dapat haruslah jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk melihat Implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar terapung selodang kelapa di kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan sub indikator tranmisi yang menghendaki agar kebijakan publik yang akan dilaksanakan untuk disampaikan kepada seluruh pelaksana dan juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut baik mereka yang berkepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung maka penulis uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dari keyinforman dalam penelitian ini yaitu Bapak Ahmad Fitri, S.Sos selaku kepala bidang pasar di dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Rabu, 1 September 2021 mengatakan bahwa;

Pada awal kejadian ambruknya lantai pasar terapung itu yang terjadi di bulan april 2016 lalu anggota kami ada melakukan kunjungan untuk

melihat kondisi lantai pasar yang ambruk, dan kami menyampaikan kepada pedagang akan mendiskusikan terlebih dahulu bagaimana kedepannya, apakah akan dilakukan perbaikan atau akan membangun TPS untuk para pedagang dan nantinya akan merelokasi para pedagang ini ke TPS tersebut bangunan di khususkan untuk para yang terkena musibah saja, dan pada tahun 2019 terjadi kembali ambruk susulan yang memperparah kondisi lantai pasar, pada saat itu wakil bupati juga ada melakukan kunjungan kepasar terapung dengan anggota dinas perdagangan dan perindustrian juga pada saat itu, kami menyampaikan kepada para pedagang bahwa pemerintah akan melakukan relokasi pasar secepatnya, selain itu juga kami dari dinas perdagangan dan perindustrian menempel selebaran itu sebagai pengingat bagi para pedagang dan juga untuk para pedagang yang tidak ada pada saat kunjungan yang kami lakukan pada saat itu

Melalui wawancara ini dapat kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan kepada para pedagang bahwa mereka akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk menetapkan kebijakan apa yang akan di ambil untuk pasar terapung tersebut apakah akan dilakukan perbaikan atau akan membangun TPS untuk para pedagang dan dalam kunjungan itu pemerintah juga menyebarkan selebaran sebagai pengingat bagi para pedagang yang mungkin saja pada saat kunjungan dilakukan sedang tidak berada di tempat.

Selanjutnya menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan H.Tarudin, SE selaku Seksi prasarana dan Penempatan di Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Kamis, 2 September 2021 mengatakan bahwa;

Menyampaikan bahwa dari awal terjadinya ambruknya lantai pasar yang sekitar 25 meja di awal ambruk dan di ambruk kedua kurang lebih ada 40 meja total yang jatuh ke sungai, mau tidak mau akan dilakukan relokasi secepatnya karena jika di pertahan kan untuk bertahan di pasar lama akan membahayakan para pedagang dan para pengunjung yang datang, dan dari pihak dinas kami sudah melakukan kunjungan dan memberikan informasi kepada para pedagang bahwasanya setelah melakukan rapat oleh para anggota hingga instansi yang terlibat sehingga kami merembukan bahwa para pedagang ini akan di relokasi ke TPS yang akan di buat oleh pemerintah untuk para pedagang

Melalui wawancara ini diketahui bahwa pemerintah telah memutuskan setelah melakukan rapat dan menimbang maka pemerintah memutuskan akan melakukan relokasi pasar terapung selodang kelapa ke TPS yang akan di bangun, karena jika melakukan perbaikan untuk bangunan pasar yang lama sudah tidak memungkinkan lagi, dan juga akan menyalahi peraturan menteri nomor 28 tahun 2015 tentang batas garis sempadan sungai.



Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pedagang sayur di pasar terapung selodang kelapa, yaitu Bapak Yogi Amdani pada sabtu 4 september mengatakan pada sub indikator komunikasi.

Waktu pemerintah datang ke pasar ini, mereka menyampaikan akan membangun TPS dan kami akan di pindahkan dalam menyampaikan informasi itu cukup mudah di mengerti, banyak janji-janji yang di sampaikan pada saat itu, kalau tidak salah pada tahun 2018 pas waktu masa masa pemilihan mereka datang ke pasar ini, tapi tidak juga cepat tindakan yang dilakukannya terlalu lama kinerjanya

Diketahui bahwa pemerintah menyampaikan informasi kepada para pedagang dengan bahasa yang mudah di mengerti oleh para pedagang, sehingga pesan yang ingin disampaikan tersampaikan dengan baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pedagang daging di pasar terapung selodang kelapa, yaitu Bapak Alfian mengatakan;

Mudahlah, walaupun pada kunjungan yang dilakukan tidak semuanya mendengar, tapi dari pemerintah itu juga ada menempel selebaran pengumuman itu, jadi kalau masalah penyampaian yang mereka lakukan selain mudah di mengerti mereka juga mencari cara lain agar semua pedagang di sini tau tentang perencanaan dari pemerintah ini, tapi kerja pemerintah ini yang sangat lama dalam pembangunan TPS untuk pasar ini, kurang lebih dari ambruk pertama tu ada tiga tahun kebiih baru di mulai pembangunannya jadi pedagang disini rata-rata pakai meja tempelah berjalan disini. Udah lebih dari 4 tahun menderita seperti ini.

Melalui wawancara dengan pedagang ini dapat diketahui bahwa informasi yang disampaikan pemerintah telah di mengerti oleh pedagang pasar terapung selodang kelapa.

2. Faktor Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Terapung

Berdasarkan Berdasarkan teori George Edward III dalam widodo (2010:98) mengemukakan bahwa sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. keberhasilan dari pencapaian tujuan implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan, indikator sumberdaya mencakup sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan keempat hal ini harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Untuk melihat Implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar terapung selodang kelapa di kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan sub indikator sumberdaya dimana indikator ini mempehatikan sumberdaya manusia seperti apa yang digunakan dalam relokasi pasar terapung selodang kelapa tersebut dan dari

mana anggaran pembangunan yang akan digunakan dalam pembangunan TPS pasar terapung tersebut, dan peralatan yang akan digunakan seperti gedung, tanah, dan sarana lainnya yang nantinya akan di gunakan dalam proses implementasi kebijakan tersebut dan kewenangan yang ada.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan keyinforman yaitu Bapak Ahmad Fitri, S.Sos selaku kepala bidang pasar di dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Rabu, 1 September 2021 mengatakan bahwa;

Dalam pelaksanaan relokasi yang dilakukan dinas perdagangan dan perindustria ini yang berperan didalamnya yang pertama kepala dinas, perdagangan dan perindustrian di ikuti oleh lalu kepala bidang pasar, baru di ikuti oleh seksi prasarana dan penempatan dan seksi seksi yang lainnya, dan dalam pelaksanaan relokasi ini kami juga melibatkan trantip dinas perdagangan dan prindustrian dan juga satpol pp sebagai keamanan, dan kalau dalam pengsahan atau sewaktu rapat awal mengenai masalah akan di lakukannya relokasi ini banyak yang terlibat mulai dari bupati, dinas perdagangan dan perindustrian, dinas pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten indragiri Hilir, kerena yang berwenang dalam pemeliharaan dan penempatan jalan adalah dinas pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten indragiri hilir.

Diketahui bahwa pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar ini tidak sepenuhnya hanya dinas pedagangan dan perindustrian saja yang bekerja, melaikan ada melibatkan dinas atau instansi lain juga, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancarabersama Bapak Ahmad Fitri, S.Sos selaku kepala bidang pasar di dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Rabu, 1 September 2021 yang mengatakan.

Pada pembangunan ini kita mendapatkan dana dari dana CSR dari dua organisasi yang ikut berperan dalam pembangunan TPS itu, yang pertama dari PT pulau sambu dan yang kedua dari bank Riau kepri dalam hal ini PT

ikut membantu pembangunan dari PT Pulau sambu dapat terbangun 54 meja/ios dan dari bank Riau kepri terbangun 76 meja/ios untuk para pedagang di pasar terapung selodang kelapa, selain itu juga kita menggunakan dana APBD, dari APBD kita dapat membangun 2 blok yaitu blok C dan D yang berjumlah 260 dengan jumlah anggaran 1,4 miliar menggunakan anggaran dari APBD.

Diketahui dalam faktor sumber daya implementasi kebijakan relokasi pasar tersebut membutuhkan dana dalam pembangunan hingga perelokasian pasar tersebut, dan diketahui bahwa ada dua organisasi atau lembaga yang berperan dalam keberlangsungan implementasi kebijakan ini, yaitu dari PT pulau sambu dn bank Riau kepri, sehingga dapat menambah jumlah bangunan ios/meja untuk para pedagang ikan dan daging di pasar terapung selodang kelapa.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Drs. H. Muklis selaku kepala Bidang Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir pada Rabu, 8 September 2021 mengenai wewenang.

Benar bahwa satpol pp berperan dalam pengawasan dan penertiban di pasar terapung tersebut, dalam hal penertiban satpol pp menertibkan para pedagang jika di temui bahwasanya ada meja meja yang tidak sesuai dengan bangunan yang semestinya seperti meja meja tempel yang dibuat sendiri oleh pedagang, dalam hal seperti itu barulah kami memiliki wewenang untuk mengawasi dan menertibkan para pedagang dengan membongkar meja meja yang tidak sesuai itu, di situlah wewenang yang kami sebagai satuan polisi pamong praja.

Diketahui bahwa satpol pp membenarkan bahwa ada keterlibatan dalam proses perelokasian pasar terapung selodang kelapa tersebut, dalam hal penertiban para pedagang jika ada yang menyalahi atau melanggar aturan yang sudah ada, seperti membangun meja tempel yang tidak sesuai dengan struktur pasar yang sudah ada.

3. Faktor Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Terapung

Untuk melihat Implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar terapung selodang kelapa di kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan sub indikator Disposisi dimana indikator ini memperhatikan pelaksanaan dan tugas tugas yang dijalankan oleh pelaku kebijakan mulai dari atasan hingga bawahan, apa yang dilakukan para pelaku sehingga dapat menimbulkan hambatan-hambatan yang memperlambat proses relokasi pasar tersebut dalam hal pembagian dan pelaksanaan tugas personel anggota pelaksana dalam relokasi pasar terapung selodang kelapa di kabupaten indragiri Hilir.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan pada sub indikator Disposisi Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dari keyinforman dalam penelitian ini yaitu Bapak Ahmad Fitri, S.Sos selaku kepala bidang pasar di dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Rabu, 1 September 2021 mengatakan bahwa;

Perencanaan hingga pelaksanaan relokasi pasar terapung selodang kelapa tersebut seluruh anggota kami saling berkoordinasi mulai pimpinan pak asisten, kemudian kepala dinas dan kemudian saya selaku kepala bidang dan juga kepala seksi dan trantib anggota pengamanan mengerti akan tugasnya masing masing, karena dalam hal ini sudah terbagi tugas sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing masing

Melalui wawancara ini dapat diketahui bahwa dalam pembagian dan pelaksanaan implementasi kebijakan relokasi pasar ini pemerintah telah mengerti akan kinerja dan posisinya masing masing dari pemimpin hingga bawahannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama H.Tarudin, SE selaku kepala Seksi prasarana dan Penempatan di dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Indragiri Hilir mengatakan;

Pengimplementasian kebijakan yang dibuat pemerintah ini kami sudah memiliki tugas dan bidangnya masing masing yang sudah di berikan oleh atasan yang mana dalam pelaksanaannya kami masing masing sudah tau akan tugas yang harus dilakukan, jadi jika ada kesalahan yang dilakukan yang membuat terhambatnya proses relokasi tersebut dapat langsung ditidak, dan mudah untuk diketahui dimana letak titik salahnya.

Pemerintah telah mengerti akan tugas dan bidangnya masing-masing

4. Faktor Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Terapung

Berdasarkan Berdasarkan teori George Edward III dalam widodo (2010: 106) menyatakan bahwa meskipun dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pelaksana sudah mengerti dan memahami akan tugas tugas yang harus dilakukan tetapi tetap saja edward mengatakan pelaksanaan ini bisa saja tidak efektif karena struktur birokrasi yang tidak efisien dalam indikator struktur birokrasi ini mencakup aspek yang harus di perhatikan yaitu pembagian kewenangan dan hubungan antar unit-unit organisasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan ini keberhasilan dari pencapaian tujuan implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan karena dalam pelaksanaan kebijakan tersebut melibatkan beberapa instansi dan organisasi yang ikut berperan dan perelokasian pasar terapung selodang kelapa di kabupaten indragiri Hilir tersebut dalam indikator struktur birokrasi harus memperhatikan prosedur orasional dan fragmentasi dimana pembagian tugas dan tanggung jawab implemntasi kebiakan yang

dilaksanakan merupakan tanggung jawab anggota pelaksana sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selanjutnya menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan H.Tarudin, SE selaku Seksi prasarana dan Penempatan di Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Kamis, 2 September 2021 mengatakan bahwa;

Ya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan relokasi pasar terapung tersebut yang berperan dalam hal ini selain dari dinas perdagangan dan perindustrian ada juga dari dinas PUTR yang menetapkan tempat di mana TPS untuk pasar tersebut boleh dibangun, karena jika di bangun di atas sungai kembali bangunan tidak bertahan lama dan juga melanggar peraturan metri PUTR nomor 28 tahun 2015 tentang garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, lalu dari satpol pp sebagai yang mengawasi sekaligus menertibkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan semestinya yang mengganggu sarana dan prasarana akan di tertibkan oleh trantib satpol pp misalnya ada meja meja tempel yang dibuat oleh pedagang, jadi sudah sesuai dengan bidangnya masing masing

Diketahui bahwa yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dan relokasi pasar terapung selodang kelapa ini bukan hanya dinas perdagangan dan perindustrian saja tetapi dinas PUTR dan Satpol PP ikut dalam rapat penetapan kebijakan pemerintah yaitu relokasi pasar terapung tersebut, dan pemerintah sudah tau dan mengerti akan bidang dan tugasnya sesuai dengan struktur birokrasi yang sudah ada, baik dari dinas perdagangan dan perindustrian, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, hingga satpol pp.

BAB VI

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari hasil seluruh wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan ambruk pasar sangat lamban karena beberapa faktor penghambat, mulai dari dana yang tidak cukup, lokasi pembangunan dan para pedagang yang tidak ingin di pindahkan ke pasar lain karena tetap ingin berjualan di lokasi pasar terapug lama, kondisi ini membuat implementasi kebijakan pemerintah susah untuk di realisasikan, sekitar 3 tahun lebih keadaan pasar tidak kunjung membaik, sehingga membuat para pedagang terpaksa membuat meja tempel agar tetap bisa berjualan, dengan kondisi pasar yang memiliki lobang yang sangat besar yang tentunya berbahaya bagi para pedagang dan para pengunjung yang datang, dan juga di tarik kesimpulan dalam hal ini tidak hanya salah dari pemerintahnya saja tetapi dari pihak para pedagang yang tidak mau di relokasikan ke pasar- pasar yang ada di kabupaten indragiri Hilir seperti pasar pagi dan pasar kayu jati yang tercatat ada 50 meja ikan dan daging yang kosong di pasar kayu jati dan 26 meja ikan dan daging yang kosong di pasar pagi.

Dan setelah di bangun TPS untuk para pedagang yang rencananya akan di relokasikan di tahun 2021 ini tetapi belum ada kejelasan kapan akan dilakukan, menurut wawancara di lapangan masih banyak pedagang yang masih tidak mau di relokasi dengan alasan posisi yang tidak strategis karena terlalu kebelakang, meja yang di buat tidak kokoh karena belum di tempati saja sudah ada meja yang

besinya bengkok, dan ada beberapa pedagang yang mengaku bahwa mereka merenovasi meja mereka masing-masing agar kokoh karena meja yang di buat oleh pemerintah tidak kokoh.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis sebagai masukan dalam kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar terapung selodang kelapa di kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintah yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar memberikan informasi yang pasti sehingga para pedagang tidak dibuat menunggu untuk keberlangsungan pembangunan bagi para pedagang ikan dan daging dan juga para pedagang sembako selanjutnya.
2. Juga kepada pihak pemerintah agar lebih memperhatikan segala kebutuhan pasar seperti memperhatikan bangunan meja yang layak, saluran membuang limbah, posisi pasar yang strategis dan yang lainnya.
3. Kepada pemerintah agar lebih cepat menemukan solusi untuk para pedagang yang saat ini tidak memiliki tempat untuk berjualan.
4. Kepada para pedagang agar mengikuti arahan dari pemerintah untuk sementara waktu mengisi pasar-pasar yang ada di kabupaten Indragiri Hilir yang tidak digunakan seperti pasar kayu jati dan pasar pagi untuk sementara waktu hingga pembangunan selanjutnya dilakukan.
5. Dan untuk pembangunan selanjutnya agar pemerintah dapat memilih lokasi pasar yang strategis dan mudah untuk dijangkau sehingga pasar terisi penuh.

Dalam implementasi kebijakan relokasi pasar ini agar berjalan dengan baik dan keputusan kebijakan yang diambil haruslah di komunikasikan kepada orang atau personalia yang tepat, yang dalam artian mengerti akan kebijakan tersebut dan merupakan orang yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut

Sehingga keputusan yang di ambil merupakan keputusan yang paling benar dan keputusan yang sudah melewati diskusi melalui komunikasi yang dilakukan sebelumnya. Komunikasi pemerintah dengan pedagang mengenai kebijakan pemerintah dalam merelokasi pasar terapung selodang kelapa. Berdaasarkan Komunikasi yang digunakan pemerintah dalam menyampaikan informasi relokasi pasar terapung tersebut dengan menggunakan media selebaran dan juga kunjungan yang dilakukan langsung oleh pihak pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggraini, Y. (2018). Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. Jakarta Selatan: INDOCAMP.
- Asyiah, N. (2018). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- D.Indriati SCP, A. W. (2008). Pasar Tradisional. Semarang: ALPRIN.
- Dr.ABU HURAERAH, M. (2019). Kebijakan Perlindungan Sosial Teori dan Aplikasi Dynami Governance. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia.
- Dr.Drs, I. N. (2017). Etika Pemerintah norma,konsep,dan praktek etika pemerintahan. yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- DR.H, I. K. (2001). pengantar ilmu pemerintahan . Jatinagoro: PT Refika Aditama.
- Dr.Suharno, S. (2020). Kebijakan Publik Berbasis Politik Rekognisi resolusi konflik multikultural melalui peraturan daerah. Surakarta: CV.INDOTAMA Solo.
- Dra. Misdyanti.R.G Kartasapoetra, S. (1993). Fungsi pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah. jakarta: Bumi Aksara.
- Pemerintah, P. (n.d.). PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN Uci Putri Setia Ningsih No BP : 1910003600253 Universitas Eka Sakti Padang.
- Dwijowijoto, R. N. (2004). Kebijakan publik formulasi,implementasi,dan evaluasi. jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto indiahono, S. M. (2017). kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis. yogyakarta: Penerbit gava media.
- Hasan Ismail, S. (2018). Ekonomi Politik Pembangunan. Ponorogo: uwais inspirasi indonesia.
- kasim, j. (2006). peran pemerintah terhadap pengelolaan pasar perspektif ekonomi salam. ekonomi islam , 305.
- Kusumanegara, S. (2010). Model dan Aktor dalam proses kebijakan publik. yogyakarta: GAVA Media.
- kusumowidagdo, A. (2019). An Analysis of sense of place in floating market lok baintan,kalimantan. Surabaya: universitas Ciputra.
- leo agustino s.sos., M. (2008). dasar- dasar kebijakan publik. Bandung: ALFABETA,cv.
- M.A, P. D. (2012). Analisis Kebijakan. jakarta: PT Bumi Aksara.

Maryono, A. (2014). *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mohamad Shohibuddin, M. N. (2013). *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 bunga rampai perdebatan*. Yogyakarta: STPN Press, Sajogyo Institute.

Muljaningsih, s. (2008). *keberadaan pasar memberikan multiplier effect terhadap pengembangan ekonomi wilayah . agribisnis kerakyatan , 17.*

Mulyawan, D. R. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: UNPAD Press.

N.Dunn, W. (2003). *pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah mada university press.

Pasaribu, A. (2016). *analisis efisiensi produksi usahatani kelapa di kecamatan keritang kabupaten indragirih hilir. JOM faferta , 3.*

prof.Dr.H.M Burhan Bungi, S. (2005). *Metodologi penelitian kuantitatif komunikasi ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.

Reksoprajitno, S. (1993). *Ekonomi Mikro perilaku harga pasar dan konsumen*. Jakarta: GunaDarma.

Santoso, B. (2009). *Manajemen Proyek konsep implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Santoso, P. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: universitas gadjahmada.

sucipto, a. (2013, juli kamis). *pasar terapung lok baintan di kalsel direvitalisasi. banjar , hal. 1.*

Sudiro. (2018). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan teori, konsep, implementasi dalam pengelolaan bantuan orasional sekolah*. Yogyakarta: CV Hikam Media Utama.

Tambunan, P. (2020). *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*. Bogor: PT Penerbit IPB press.

B.Miles, M. (2009). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia press.

Hamidi, M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.

hutahayan, j. F. (2019). *informasi dan kinerja pelayanan publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

JURNAL

Ajtai, G., Hegyi, N., Petruska, E., & Perczel Forintos, D. (2008). Hopelessness in patients presenting to their family physician. *Psychiatria Hungarica : A Magyar Pszichiátriai Társaság tudományos folyóirata*, 23(1), 34–41.

Arianty, N. (2013). Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 13(01), 12.

Armi, A., Soeaidy, S., & Hayat, A. (2016). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(10), 1–6.

Dalam, N., & Pasar, R. (2016). Skripsi implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten ngada dalam relokasi pasar tradisional.

Dewi, N. M. (2015). Resistensi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo. *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 126–136.

Firmansyah, A. A. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam UU Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum*, XVII(67), 419–432.

Geografi, J. P. (2016). 1. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lambung Mangkurat. 3(4), 40–57.

Ii, B. A. B., Pemasaran, I. I. P., & Stanton, W. J. (1990). Yang Berasal Dari Kata “.

Jatmika, P. P. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Probolinggo. *Sawala*, 5(2), 35–47.

Mening Subekti, Muslih Faozanudin, A. R. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 58–71. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/index>

Nursalam, 2016, metode penelitian, & Fallis, A. . . *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Rakinang, M., Kimbal, M., Egeten, M., & Pas, R. (2018). *Issn :2337 - 5736*. 1, 1–8.

Setiaji, K., & Fatuniah, A. L. (2018). Pengaruh Modal, Lama Usaha dan Lokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Pasca Relokasi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.21009/jpeb.006.1.1>

Sofyan, M. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA

MEDAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Pusat Pasar Medan dan Sekitarnya) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN.

wiwik setyaningsih. (2001). Dan O Tonomi D Aerah R Evitalisasi P Roses D

Wiryadi. (2021). Perkebunan. Tembilahan: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Agustina, R. A. (2017, oktober senin). setahun pasca ambruk, pasar terapung tembilahan tak kunjung direnovasi . Dipetik desember rabu, 2020, dari GoRiau.com.

Dokumen

UU Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas UU Tahun 2014 *tentang pemerintah daerah*

Perda Nomor 25 Tahun 2010 *tentang izin usaha perikanan di kelola oleh pemerintah*

Perda nomor 21 Tahun 2008 *tentang ketertiban umum*

Perda Nomor 16 Tahun 2009 *tentang pedoman pengelolaan pasar*

Keputusan bupati dalam ktps 135/II/HK-2019 *Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Relokasi Pasra Terapung*

PUPR Nomor 28 Tahun 2015 *Tentang penetapan garis sepadan sungai dan garis sepadan danau*

Peraturan Menteri PU Nomor 63/PRT /1993 *Tentang garis sepadan sungai, manfaat sungai*